



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN LITBANG**



www.bapplit.tanatidungkab.go.id



bappedalitbangktt@gmail.com



Jl. Perintis RT. VII (EKS. RSUD
AKHMAD BERAHIM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LITBANG
KABUPATEN TANA TIDUNG



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
Kabupaten Tana Tidung
Alamat : Jl. Perintis RT. VII (Eks. RSUD Akhmad Berahim)
Website : www.bapplit.tanatidungkab.go.id
E-mail : bappedalitbangktt@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2025. Penyusunan Laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung.

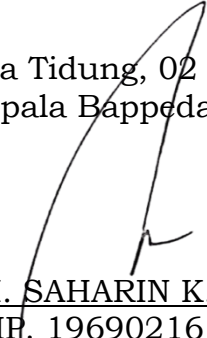
Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Komitmen, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025, ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang

Kabupaten Tana Tidung pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Tana Tidung, 02 Februari 2025
Kepala Bappeda dan Litbang



H. SAHARIN K., S.Pi., M.Si
NIP. 196902161998031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 merupakan fase transisi karena penyusunan laporan kinerja pada tahun ini mengacu pada dua kerangka perencanaan, yaitu dokumen **RKPD/Periode Transisi** dan penyesuaian indikator kinerja baru berdasarkan **Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029** serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 tidak hanya mencerminkan hasil pelaksanaan target dalam dokumen transisi, namun juga menunjukkan kesiapan implementasi indikator baru yang mulai digunakan untuk siklus Renstra yang berjalan.

Kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator berada dalam fase penyesuaian tata kelola, metode pengukuran, dan penyediaan data dukung. Beberapa indikator yang baru diberlakukan pada tahun ini masih melalui proses validasi baseline sehingga realisasi capaian baru dapat menggambarkan progres awal. Kondisi ini wajar mengingat tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi Renstra 2025–2029.

A. Capaian Kinerja Makro (tujuan).

Capaian tujuan **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik, Tepat Waktu dan Inovatif”** diukur dengan indikator kinerja :

1. **Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi** dengan rumus hitung yaitu Rata-Rata capaian Indikator RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029, dengan metode ukur capaian RPJMD yaitu **Persentase Capaian = Jumlah Indikator tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan kategori Sangat Tinggi : total jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 x 100%**.
2. **Indeks Inovasi Daerah**, data diperoleh dari Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.10.11 –

4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2025.

3. Adapun capaian kinerja indikator **“Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi”** dengan target **93%**, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi sebesar **74,25%**. Dengan demikian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung atas capaian RPJMD memiliki capaian sebesar **79,83%**.
4. Data capaian kinerja tahun 2024 untuk indikator ini tidak disajikan sebagai pembandingan (n-1) dikarenakan adanya perubahan fundamental pada struktur Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2024, evaluasi kinerja berfokus pada **Nilai Kualitas Perencanaan** (melalui instrumen SAKIP), sedangkan mulai tahun 2025, sejalan dengan masa transisi RPJMD, indikator telah dipertajam untuk mengukur **Capaian Riil Indikator Tujuan dan Sasaran**. Oleh karena itu, realisasi tahun 2025 ditetapkan sebagai **baseline** untuk pengukuran kinerja pada periode Renstra berjalan."Terjadinya penurunan capaian kinerja dikarenakan masa transisi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dimana banyak indikator makro yang berubah dari dokumen RPJMD tahun 2021-2026 dengan RPJMD 2025-2029. Meski demikian, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator RPJMD telah mencapai kategori sangat tinggi, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.
5. Capaian indikator **“Indeks Inovasi Daerah”** dengan target **49,96** sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi **55**. Dengan demikian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung tercapai dengan capaian sebesar 110%.
6. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar **45,64** terjadi peningkatan kinerja sebesar **9,36**.

B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis.

Capaian sasaran strategis **"Meningkatnya Pembangunan yang Berkesinambungan"** :

1. Diukur dengan indikator kinerja :

- Persentase tingkat keselarasan program prioritas RPJMD terhadap program prioritas RPJMN dengan rumus hitung yaitu Persentase Keselarasan = $\frac{\text{Jumlah program prioritas RPJMD yang selaras dengan RPJMN}}{\text{Total program prioritas RPJMD}} \times 100\%$.
- Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi dengan rumus hitung Persentase Keselarasan = $\frac{\text{Jumlah program prioritas RPJMD KAB yang selaras dengan RPJMD Prov}}{\text{Total program prioritas RPJMD KAB}} \times 100\%$
- Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RKP dengan rumus hitung yaitu Tingkat Keselarasan = $\frac{\text{Jumlah program prioritas RKPD yang selaras dengan RKP}}{\text{Total program prioritas RKPD}} \times 100\%$
- Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD Dengan Program Prioritas RKPD Provinsi dengan rumus hitung Tingkat Keselarasan = $\frac{\text{Jumlah program prioritas RKPD Kab yang selaras dengan RKPD Prov}}{\text{Total program prioritas RKPD Kab}} \times 100\%$

2. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Adapun target capaian indikator kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Pembangunan yang Berkesinambungan" tahun 2025 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung tercapai dengan capaian sebesar 100%.

4. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 90% terjadi peningkatan sebesar 10 %.

Capaian sasaran strategis **"Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan"** :

1. Diukur dengan indikator kinerja **"Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Dengan Kategori Sangat Tinggi"** dengan rumus perhitungan "Persentase Capaian = jumlah indikator tujuan dan saran RKPD dengan capaian sangat tinggi : jumlah indikator tujuan dan sasaran RKPD x 100%".
2. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Adapun target capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut tahun 2025 sebesar **82%**, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi **77,77%**. Dengan demikian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung tercapai dengan capaian sebesar **94,85%**.
4. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar **69,27%** terjadi peningkatan sebesar **8,5%**.

Capaian sasaran strategis **"Meningkatnya Implementasi Hasil Kajian Kelitbangan Dalam Pelaksanaan Pembangunan"** :

1. Diukur dengan indikator kinerja "Persentase Hasil kajian kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan" dengan rumus perhitungan "Rekomendasi Kajian yang ditindaklanjuti dalam RENSTRA / RENJA / PROGRAM / KEGIATAN / RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1".
2. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Penelitian dan Pengembangan.
3. Adapun target capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut tahun 2025 sebesar **70%**, sampai dengan bulan Desember 2025

terrealisasi **100%**. Dengan demikian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung tercapai dengan capaian sebesar **145%**.

4. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar **87,5%** terjadi peningkatan sebesar **57,5 %**.

Capaian sasaran strategis "**Meningkatnya Implementasi Inovasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan**" :

1. Diukur dengan indikator kinerja "**Persentase Inovasi Yang diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah**" dengan rumus perhitungan "Jumlah Inovasi yang diimplementasikan dan ditindaklanjuti dalam pembangunan berdasarkan SK Penetapan Inovasi Daerah".
2. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Penelitian dan Pengembangan.
3. Adapun target capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut tahun 2025 sebesar **75%**, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi **96,55%**. Dengan demikian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung tercapai dengan capaian sebesar **128,73%**.
4. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 tidak dilakukan pengukuran karena bukan merupakan target kinerja utama/sasaran strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung. Setelah dilakukan perbaikan penyusunan pohon kinerja, barulah indikator tersebut menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama.

Terhadap Capaian Kinerja Sebagaimana Tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung kedepan, sebagai berikut :

- a. **Bias Target Masa Transisi**: Adanya perumusan target yang terlalu optimis pada masa transisi penyusunan RPJMD menyebabkan beberapa indikator sulit tercapai secara maksimal sesuai realitas di lapangan.
- b. **Dinamika Regulasi dan Perubahan Indikator**: Adanya Instruksi Menteri (Inmen) terkait penyusunan perencanaan pembangunan

memunculkan indikator-indikator baru yang belum pernah diukur atau dilaksanakan sebelumnya.

- c. **Keterbatasan Basis Data (Baseline):** Munculnya berbagai indikator kinerja baru yang tidak disertai dengan ketersediaan basis data (data historis) yang memadai menyulitkan proses pengukuran dan pemantauan perkembangan kinerja secara akurat.
- d. **Perubahan Fokus Program:** Penekanan pada program prioritas nasional terkadang memerlukan penyesuaian sumber daya yang berdampak pada pemenuhan target indikator lokal yang bersifat spesifik.
- e. **Keberlanjutan Inovasi (Sustainability):** Masih ditemukan inovasi yang bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan setelah masa rintisan berakhir, sehingga dampaknya belum dirasakan secara permanen oleh masyarakat.
- f. **Keterbatasan Mindset Inovasi:** Terdapat kecenderungan pola pikir yang masih membatasi makna inovasi hanya pada pengembangan berbasis Teknologi Informasi (IT-sentris). Hal ini menghambat munculnya inovasi non-teknologi (seperti inovasi kebijakan atau sosial) yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik.
- g. **Implementasi di Lapangan:** Meskipun indeks inovasi tinggi, **Persentase Inovasi yang Diimplementasikan** baru mencapai **96,55%**. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA Bappeda dan Litbang Tahun 2021-2026 capaian kinerja baru sebesar **88,23 %**, hal ini menunjukkan adanya jeda antara penciptaan ide dengan penerapan praktis secara menyeluruh.
- h. **Pergeseran Fokus melalui Rakortekrenbang:** Mekanisme Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) sering kali mengharuskan program, kegiatan, maupun sub-kegiatan yang krusial bagi target kinerja spesifik daerah mengalami pergeseran demi mengakomodasi prioritas nasional.
- i. **Keterbatasan Kapasitas Fiskal:** Kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat berdampak langsung pada penurunan kemampuan

ekonomi fiskal daerah. Hal ini membatasi ruang gerak daerah dalam membiayai program-program prioritas pembangunan yang bersifat lokal namun strategis.

- j. **Dinamika Regulasi dan Batas Waktu:** Munculnya indikator-indikator kinerja baru yang bersifat mandatori memerlukan proses pemetaan kinerja secara berulang. Kondisi ini sering kali melewati batas waktu ideal sesuai ketentuan **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga menimbulkan risiko administratif dalam siklus perencanaan.
- k. **Kelemahan Sistem Pelaporan Kinerja:** Masih terdapat kendala dalam sistem pelaporan yang belum sepenuhnya tepat waktu dan terukur (*measurable*). Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh data *time series* yang akurat dan berkesinambungan.
- l. **Keterbatasan Data untuk Penanganan Cepat:** Kelemahan pada sistem data tersebut menghambat proses pengambilan keputusan pada isu-isu prioritas yang membutuhkan penanganan cepat dan responsif. Tanpa ketersediaan data yang *real-time*, evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan menjadi kurang maksimal.
- m. **Belum terselenggaranya Sistem Kajian Satu Pintu:** Belum terbangunnya sistem manajemen kajian yang terintegrasi karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam pembiayaan kajian mengakibatkan banyak hasil penelitian tersebar di berbagai unit kerja. Hal ini menyebabkan pemanfaatan hasil kajian tidak optimal dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan secara menyeluruh.
- n. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:** Kurangnya kuantitas dan kapasitas tenaga peneliti internal di Kabupaten Tana Tidung menjadi kendala utama dalam kemandirian riset daerah.
- o. **Ketergantungan Eksternal:** Akibat keterbatasan SDM lokal, pelaksanaan kajian masih sangat bergantung pada kerja sama dengan perguruan tinggi di luar kabupaten. Hal ini sering kali berdampak pada jeda waktu koordinasi dan penyesuaian konteks lokal dalam rekomendasi kebijakan.

- p. **Sistem Pelaporan yang Belum Measurable:** Lemahnya sistem pelaporan yang tepat waktu menyulitkan proses evaluasi terhadap sejauh mana rekomendasi kajian telah benar-benar diterapkan dalam program kerja perangkat daerah.
- q. **Lemahnya Sistem Monitoring dan Evaluasi:** Belum tersedianya instrumen pengawasan yang kuat untuk memantau sejauh mana efektivitas implementasi hasil kajian dalam praktik pembangunan. Hal ini menyebabkan sulitnya mengukur dampak nyata dari rekomendasi penelitian terhadap peningkatan kinerja daerah.
- r. **Inovasi Belum Berbasis Riset:** Pengembangan inovasi sebagian besar masih berfokus pada penyelesaian kendala teknis di lapangan secara spontan dan belum sepenuhnya berbasis pada data atau rekomendasi hasil kajian kelitbangan. Hal ini menyebabkan inovasi kurang berorientasi pada kemanfaatan strategis jangka panjang dalam mencapai kinerja pembangunan.
- s. **Kurangnya Diseminasi Digital:** Belum terdiseminasinya informasi inovasi secara digital menyebabkan pengembangan inovasi sering kali terhenti di tahap rintisan dan tidak berkelanjutan (*sustainable*).
- t. **Lemahnya Promosi dan Jangkauan:** Dampak pengembangan inovasi belum menyentuh masyarakat secara luas karena kurangnya strategi promosi yang masif, terkecuali pada beberapa jenis inovasi unggulan tertentu seperti **Rusa Muda**.
- u. **Kelemahan Administrasi:** Lemahnya pemenuhan dokumen administrasi pendukung inovasi berakibat pada ketidakmampuan inovasi daerah untuk berkompetisi secara optimal pada ajang penghargaan inovasi di tingkat nasional maupun internasional.
- v. **Pola Pikir IT-Sentris:** Masih terdapat kecenderungan bahwa inovasi selalu identik dengan teknologi informasi, sehingga potensi inovasi non-digital (inovasi kebijakan/sosial) belum tergali secara maksimal.

Sejalan dengan penyesuaian perencanaan periode 2025-2029, mulai Tahun 2025 juga diperkenalkan **indikator baru**, antara lain:

1. Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD dengan Kategori Sangat Tinggi, yang pada tahun sebelumnya dikenakan Indikator Persentase capaian program prioritas pembangunan dalam kategori Sangat Baik.

Indikator-indikator baru ini diadopsi untuk memperkuat pengukuran outcome yang lebih relevan dan berorientasi dampak, khususnya dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penegakan regulasi, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tahap awal, capaian indikator baru ini lebih menekankan aspek **readiness** seperti ketersediaan baseline, pemutakhiran SOP pengukuran, dan konsistensi metode pelaporan antar unit pelaksana.

Penyesuaian indikator ini turut berdampak pada pola capaian kinerja tahun ini, di mana realisasi target berada pada fase pemetaan kondisi awal (baseline building) dan penyelarasan terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, capaian kinerja tahun ini tidak hanya mencerminkan output program, melainkan juga kesiapan sistem evaluasi kinerja yang lebih terukur dan adaptif.

Terdapat perbedaan tren antara capaian indikator Tujuan (RPJMD) yang terkoreksi turun sebesar 11,45% dengan capaian Sasaran Strategis (RKPD) yang meningkat 8,5%. Kondisi ini disebabkan oleh **perubahan basis data (baseline) dan metodologi pengukuran** pada indikator makro di masa transisi perencanaan, sementara kinerja operasional tahunan tetap menunjukkan tren positif berkat efektivitas pelaksanaan program kerja tahun 2025.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Tahun 2025 dapat dikategorikan sebagai periode konsolidasi awal menuju tata kelola kinerja yang lebih akurat, sistematis, dan berorientasi hasil. Dengan peningkatan kualitas data, konsistensi metode pengukuran, serta penguatan kapasitas pelaksana, capaian kinerja pada tahun berikutnya diharapkan dapat menunjukkan peningkatan yang lebih optimal dan

mencerminkan keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis Renstra 2025–2029.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	4
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	5
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 7
2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappeda dan Litbang	7
2.1.1 RENSTRA Bappeda dan Litbang Tahun 2021-2026	7
2.1.2 RENSTRA Bappeda dan Litbang Tahun 2025-2029	14
2.2 Rencana Kerja Tahun 2025	24
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	26
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 33
3.1 Capaian Kinerja RENSTRA Transisi 2025-2029 dan PK Periode Terkait	33
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	34
3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan	34
3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	41
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah	47

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	54
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	75
3.1.7 Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	80
3.2 Realisasi Anggaran	88
BAB IV PENUTUP	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	4
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	8
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	10
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun n	15
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	19
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	25
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	26
Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	28
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	34
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	35
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	42
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	48
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	51
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	55
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	76
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	81
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan pemerinahan bidang urusan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembangunan yang diberikan kepada daerah Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung mempunyai fungsi :

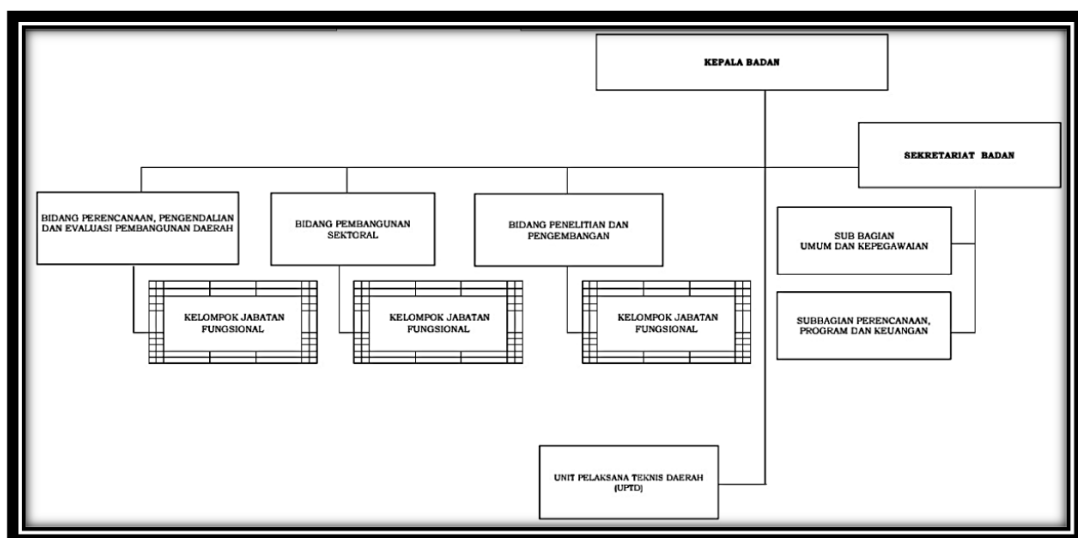
- a. Perumusan kebijakan bidang perencanaan serta bidang penelittian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan atau tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan evalusai dan pelaporan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan adminsitirasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai mana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung. Berikut bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung

Sumber : Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 80 Tahun 2021



1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung :

Tabel 1.1
Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2024) dan Tahun (2025)

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2024	Rp. 20.762.220.551,-
APBD	2025	Rp. 17.947.615.874,-
SumberLainnya (Jika Ada)		Rp

Sumber : DPA Bappeda dan Litbang TA 2024-2025

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Pada tahun 2025 merupakan masa transisi untuk perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilatarbelakangi pergantian masa kepemimpinan Kepala Negara dan Daerah secara serentak di Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang diselenggarakan Tahun 2024. Untuk memprakarsai Visi Misi Presiden dan Bupati/Walikota terpilih, maka perlu disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dengan tetap memperhatikan pencapaian target indikator kinerja pada dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021-2029. Berikut paparan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029.

2.1.1 RENSTRA BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2021-2026

Tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung adalah “Meningkatnya Kinerja Rencana Pembangunan Daerah yang Baik Tepat Waktu dan Inovatif”. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis
2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kinerja Rencana Pembangunan Daerah yang baik tepat waktu dan inovatif			Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori SANGAT TINGGI	80%	85%	90%	95%	100%
				Indeks Inovasi Daerah	56,25	61	62	63	64
		1.1	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan Secara berkelanjutan antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD/RKPD terhadap Program Prioritas RPJMN/RKP	90%	90%	90%	90%	100%
				Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD/RKPD dengan Program Prioritas RPJMD/RKPD Provinsi	90%	90%	90%	90%	100%
		1.2	Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Capaian Program Prioritas Pembangunan dalam kategori sangat tinggi	75%	80%	85%	90%	95%

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.3	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil kajian kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan	65%	70%	75%	80%	85%
				Persentase Hasil Inovasi yang diimplementasikan Dalam pembangunan	75%	80%	85%	90%	90%

Sumber : Renstra Bappeda dan Litbang Periode 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung berdasarkan RENSTRA Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kinerja Rencana Pembangunan Daerah yang baik tepat waktu dan inovatif	1.1	Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori SANGAT TINGGI	%	Persentase indikator kinerja dalam RPJMD yang capaian realisasinya berada pada kategori sangat tinggi dibandingkan dengan total indikator RPJMD yang dievaluasi pada tahun berjalan. Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.	Persentase Capaian = Jumlah indikator RPJMD dengan capaian sangat tinggi : Total indikator RPJMD yang dievaluasi × 100%	Laporan Monev RKPD
		1.2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pengembangan, penerapan, dan keberlanjutan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan daya saing daerah. Indeks ini disusun berdasarkan penilaian terhadap aspek kebijakan inovasi, kelembagaan, sumber daya, proses inovasi, serta hasil	Nilai indeks diperoleh dari hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data inovasi daerah yang dilaporkan dalam sistem penilaian inovasi daerah.	LHE Indeks Inovasi Daerah dari MENDGAR I

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					dan dampak inovasi daerah.		
2	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan Secara berkelanjutan antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional	2.1	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD/RKPD terhadap Program Prioritas RPJMN/RKP	%	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD/RKPD terhadap Program Prioritas RPJMN/RKP adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kesesuaian dan keterpaduan program prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD/RKPD dengan program prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN/RKP. Indikator ini menunjukkan sejauh mana arah, sasaran, dan program prioritas pembangunan daerah telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.	Persentase Keselarasan= Jumlah program prioritas RPJMD/RKPD yang selaras dengan RPJMN/RKP : Total program prioritas RPJMD × 100%	keselarasan program prioritas RPJMD dengan Astacita / Keselarasan program pusat dan daerah berdasarkan hasil RAKORTEK RENBANG (SIPD Perencanaan)
		2.2	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD/RKPD dengan Program Prioritas RPJMD/RKPD Provinsi	%	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD/RKPD Kabupaten terhadap Program Prioritas RPJMD/RKPD Provinsi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kesesuaian dan keterpaduan program prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam	Persentase Keselarasan= Jumlah program prioritas RPJMD/RKPD KAB yang selaras dengan RPJMD /RKPDProv : Total program prioritas RPJMD/RKPD KAB × 100%	Keselaran Program Prioritas RPJMD/RKP D KTT dengan Program Prioritas RPJMD/RKP D Prov / Keselarasan Program berdasarkan RAKORTEK RENBANG (SIPD

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					RPJMD/RKPD Kabupaten dengan program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD/RKPD Provinsi. Indikator ini menunjukkan sejauh mana arah, sasaran, dan program prioritas pembangunan daerah telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi.		Perencanaan)
3	Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan	3.1	Persentase Capaian Program Prioritas Pembangunan dalam kategori sangat tinggi	%	Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD dengan Kategori Sangat Tinggi adalah ukuran yang menunjukkan proporsi indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD yang realisasi capaiannya berada pada kategori sangat tinggi dibandingkan dengan seluruh indikator tujuan dan sasaran RKPD yang dievaluasi pada tahun berjalan. Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.	Persentase Capaian = jumlah indikator tujuan dan sasaran RKPD dengan capaian sangat tinggi : jumlah indikator tujuan dan sasaran RKPD x 100%	Laporan MONEV RKPD
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil	4.1	Persentase hasil kajian	%	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang Diimplementasikan	Rekomendasi Kajian yang ditindaklanjuti dalam RENSTRA/RENJA/	Laporan Monev Kelitbangan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kelitbangan dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan		dalam Pembangunan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi hasil kajian penelitian dan pengembangan (kelitbangan) yang telah dimanfaatkan dan diterapkan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, maupun pelaksanaan pembangunan daerah dibandingkan dengan seluruh hasil kajian kelitbangan yang dihasilkan pada periode tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pembangunan daerah.	PROGRAM/KEGIATAN/RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	
		4.2 Persentase Hasil Inovasi yang diimplementasikan Dalam pembangunan	%	Persentase Inovasi yang diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan proporsi inovasi daerah yang telah diterapkan secara nyata dalam kebijakan, program, kegiatan, atau layanan publik pembangunan daerah dibandingkan dengan seluruh inovasi daerah yang	Jumlah Inovasi yang diimplementasikan dan ditindaklanjuti dalam pembangunan berdasarkan SK Penetapan Inovasi Daerah	Laporan Monev Inovasi Daerah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					dihasilkan atau ditetapkan pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat pemanfaatan inovasi dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan publik, dan daya saing pembangunan daerah.		

Sumber : Indikator Kinerja Utama Bappeda dan Litbang Kab. Tana Tidung Tahun 2025

2.1.2 RENSTRA BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2025-2029

Tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik, Tepat Waktu dan Inovatif”. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung dalam RENSTRA Tahun 2025-2029 :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode
Rencana Strategis 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik, Tepat Waktu dan Inovatif			Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi (%)	91	92	93	94	95
				Indeks Inovasi Daerah (Angka)	48,6 4	49,9 6	51,28	52,5 9	53,9 1
		1.1	Meningkatnya Pembangunan yang Berkesinambungan	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD terhadap Program Prioritas RPJMN (%)	100	100	100	100	100
				Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				RPJMD dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi (%)					
				Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RKP (%)	100	100	100	100	100
				Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD Dengan Program Prioritas RKPD Provinsi (%)	100	100	100	100	100
		2.1	Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Dengan Kategori Sangat Tinggi (%)	91	92	93	94	95

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3.1	Meningkatnya Implementasi hasil kajian kelitbangan dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Hasil kajian kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan (%)	70	75	80	82	85
		4.1	Meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Inovasi Yang diimplementasikan dalam Pembangunan Dearah (%)	75	76	78	80	82

Sumber : Renstra Bappeda dan Litbang Periode 2025-2029

Secara garis besar, tidak ada perbedaan yang signifikan pada penetapan konteks tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung baik yang tertera dalam RENSTRA Tahun 2021-2026 maupun pada RENSTRA Tahun 2025-2029. Namun, hal yang cukup menjadi perhatian adalah perbedaan sasaran pada urusan penelitian dan kelitbangan. Dimana pada RENSTRA Tahun 2021-2026 sasaran urusan kajian kelitbangan dijadikan satu dengan konteks sasaran “Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah” yang kemudian pada RENSTRA Tahun 2025-2029 dispesifikan menjadi dua sasaran yakni :

1. Meningkatnya Implementasi hasil kajian kelitbangan dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Meningkatnya Implementasi Inovasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Adapun pertimbangan dalam penetapan konteks sasaran pada urusan penelitian dan pengembangan yakni agar pencapaian kinerja kajian dan inovasi dapat lebih berfokus pada sektor kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja masing-masing. Dimana kajian berfokus pada peningkatan kualitas kajian itu sendiri yang akan menjadi dasar dari pengambilan kebijakan dan strategi pembangunan. Sementara itu, inovasi akan berfokus pada pengembangan inovasi baik inovasi pada sektor pemerintahan, swasta, maupun Masyarakat umum tanpa harus berdasarkan hasil rekomendasi kajian yang perlu disusun sebelumnya. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada RENSTRA Tahun 2021-2026 serta RENSTRA tahun 2025-2029 adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung dititikberatkan berdasarkan RENSTRA Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik, Tepat Waktu dan Inovatif	1.1 Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi	%	Persentase indikator kinerja dalam RPJMD yang capaian realisasinya berada pada kategori sangat tinggi dibandingkan dengan total indikator RPJMD yang dievaluasi pada tahun berjalan. Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.	Persentase Capaian = Jumlah indikator RPJMD dengan capaian SANGAT TINGGI : Total indikator RPJMD yang dievaluasi × 100%	Laporan Monev RKPDP
		1.2 Indeks Inovasi Daerah	Angka	ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pengembangan, penerapan, dan keberlanjutan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan daya saing daerah. Indeks ini disusun berdasarkan penilaian terhadap aspek kebijakan inovasi, kelembagaan, sumber daya, proses inovasi, serta hasil dan dampak inovasi daerah.	Nilai indeks diperoleh dari hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data inovasi daerah yang dilaporkan dalam sistem penilaian inovasi daerah.	LHE Indeks Inovasi Daerah dari MENDGAR I
2	Meningkatnya Pembangunan yang Berkesinambungan	2.1 Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas	%	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD terhadap Program Prioritas	Persentase Keselarasan= Jumlah program prioritas RPJMD/RKPD yang	keselarasan program prioritas RPJMD dengan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			RPJMD terhadap Program Prioritas RPJMN		RPJMN adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kesesuaian dan keterpaduan program prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD dengan program prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Indikator ini menunjukkan sejauh mana arah, sasaran, dan program prioritas pembangunan daerah telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.	selaras dengan RPJMN/RKP : Total program prioritas $RPJMD \times 100\%$	Astacita / Keselarasan program pusat dan daerah berdasarkan hasil RAKORTEK RENBANG (SIPD Perencanaan)
		2.2	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD Kab dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi	%	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD Kabupaten terhadap Program Prioritas RPJMD Provinsi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kesesuaian dan keterpaduan program prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten dengan program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi. Indikator ini menunjukkan sejauh mana arah, sasaran, dan	Persentase Keselarasan= Jumlah program prioritas RPJMD KAB yang selaras dengan RPJMD Prov : Total program prioritas RPJMD KAB $\times 100\%$	Keselarasan Program Prioritas RPJMD KTT dengan Program Prioritas RPJMD Prov / Keselarasan Program berdasarkan RAKORTEK RENBANG (SIPD Perencanaa n)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					program prioritas pembangunan daerah telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi.		
		2.3	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RKP	%	Keselaran Program Prioritas pada RKPD dengan RKP adalah tingkat kesesuaian program prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan program prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun perencanaan yang sama. Indikator ini menggambarkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan nasional.	Tingkat Keselarasan=Jumlah program prioritas RKPD yang selaras dengan RKP : Total program prioritas RKPD ×100%	Keselaran Program Prioritas Pada RKPD dengan RKP tahun 2025 dan tahun 2025 (SIPD Perencanaan)
		2.4	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD Dengan Program Prioritas RKPD Provinsi	%	Keselaran Program Prioritas pada RKPD Kab dengan RKPD Prov adalah tingkat kesesuaian program prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KAB dengan program prioritas	Tingkat Keselarasan=Jumlah program prioritas RKPD Kab yang selaras dengan RKP D Prov : Total program prioritas RKPD Kab ×100%	Keselaran Program Prioritas Pada RKPD KTT dengan RKPD Provinsi Kaltara tahun 2025 dan tahun 2025 (SIPD Perencanaan)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					pembangunan Provinsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Prov pada tahun perencanaan yang sama. Indikator ini menggambarkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah provinsi.		
3	Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan	3.1	Persentase Capaian Program Prioritas Pembangunan dalam kategori sangat tinggi	%	Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD dengan Kategori Sangat Tinggi adalah ukuran yang menunjukkan proporsi indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD yang realisasi capaiannya berada pada kategori sangat tinggi dibandingkan dengan seluruh indikator tujuan dan sasaran RKPD yang dievaluasi pada tahun berjalan. Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.	Persentase Capaian = jumlah indikator tujuan dan saran RKPD dengan capaian sangat tinggi : jumlah indikator tujuan dan sasaran RKPD x 100%	Laporan MONEV RKPD
4	Meningkatnya Implementasi hasil kajian kelitbangan dalam pelaksanaan pembangunan	4.1	Persentase hasil kajian kelitbangan yang	%	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Pembangunan	Rekomendasi Kajian yang ditindaklanjuti dalam RENSTRA/RENJA/ PROGRAM/KEGIAT AN/RENCANA AKSI	Laporan Monev Kelitbangan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			diimplemen tasikan dalam pembangun an		adalah ukuran yang menunjukkan proporsi hasil kajian penelitian dan pengembangan (kelitbangan) yang telah dimanfaatkan dan diterapkan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, maupun pelaksanaan pembangunan daerah dibandingkan dengan seluruh hasil kajian kelitbangan yang dihasilkan pada periode tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pembangunan daerah.	PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	
5	Meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	5.1	Persentase Hasil Inovasi yang diimplemen tasikan Dalam pembangun an	%	Persentase Inovasi yang Diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan proporsi inovasi daerah yang telah diterapkan secara nyata dalam kebijakan, program, kegiatan, atau layanan publik pembangunan daerah dibandingkan dengan seluruh inovasi daerah yang dihasilkan atau ditetapkan pada	Jumlah Inovasi yang diimplementasikan dan ditindaklanjuti dalam pembangunan berdasarkan SK Penetapan Inovasi Daerah	Laporan Monev Inovasi Daerah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat pemanfaatan inovasi dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan publik, dan daya saing pembangunan daerah.		

Sumber : Indikator Kinerja Utama Bappeda dan Litbang Kab. Tana Tidung Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 . Berikut Rencana Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 :

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2025 Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik, Tepat Waktu dan Inovatif.			Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi (%)	%	91/93/95
				Indeks Inovasi Daerah	Angka	48,64/49,96

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		1.1	Meningkatnya Pembangunan yang Berkesinambungan	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD terhadap Program Prioritas RPJMN	%	100
				Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi	%	100
				Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RKP	%	100
				Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD Dengan Program Prioritas RKPD Provinsi	%	100
		1.2	Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Dengan Kategori Sangat Tinggi	%	82/90/ 91/92
		1.4	Meningkatnya Implementasi hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil kajian kelitbangan	%	70

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dalam pelaksanaan pembangunan	yang diimplementasikan dalam pembangunan (%)		
		1.5 Meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Inovasi Yang diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah (%)	%	70/75

Sumber : Rencana Kerja Bappeda dan litbang KTT tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat keselarasan Program	93

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	yang Berkelanjutan Antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Prioritas RPJMD terhadap Program Prioritas RPJMN	
		Persentase Tingkat keselarasan Program Prioritas RPJMD Kab terhadap Program Prioritas RPJMD Prov	93
		Persentase Tingkat keselarasan Program Prioritas RKPD terhadap Program Prioritas RKP	93
		Persentase Tingkat keselarasan Program Prioritas RKPD Kab terhadap Program Prioritas RKPD Provinsi	93
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang diimplemenyasikan dalam pembangunan	88
3	Terkendalnya Pelaksanaan Pembangunan	Persenatse Capaian Program prioritas pembangunan Dalam kategori Sangat Tinggi	92

Sumber :Perjanjian Kinerja Bappeda dan litbang Kab.Tana Tidung Tahun 2025

Program

1. Program perencanaan, pengendalian Dan evaluasi pembangunan daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Anggaran

- Rp. 7.400.805.500,-
- Rp. 2.540.790.255,-
- Rp. 1.284.345.000,-

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung :

**Tabel 2.7 Program Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis Program	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pagu Indikatif yang mendukung pembiayaan program prioritas pembangunan daerah	67%
			Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RPJMD	100%
2	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi dalam mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang utuh	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir dan terintegrasi	100%
3	Meningkatnya efektivitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian dan	Persentase capaian RKPD	90%

No.	Sasaran Strategis Program	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
		Evaluasi Pembangunan Daerah	dengan kategori sangat tinggi	
4	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Program Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator kinerja utama Perangkat Daerah Bidang Urusan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan kategori SANGAT TINGGI	90%
			Persentase Capaian Indikator kinerja utama Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat kategori SANGAT TINGGI	90%
5	Meningkatnya keselarasan Perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah	Program Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RENSTRA PD bidang urusan pemerintahan, SDM dan Kesejahteraan Rakyat terhadap RPJMD	100%

No.	Sasaran Strategis Program	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
			Persentase Keselarasan RENSTRA PD bidang urusan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan terhadap RPJMD	100%
			Persentase keselarasan RENJA PD Bidang urusan perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan terhadap RKPD	100%
			Persentase keselarasan RENJA PD Bidang urusan pemerintahan, pembangunan manusia dan Kesejahteraan rakyat terhadap RKPD	100%
			Persentase potensi anggaran non APBD KTT yang mendukung tercapainya program prioritas	77%

No.	Sasaran Strategis Program	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
			pembangunan yang diperoleh	
6	Meningkatnya Integrasi Rekomendasi Kajian Kelitbangan yang mendukung program prioritas pembangunan kedalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Kajian Kelitbangan Yang diintegrasikan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah	75%
			Persentase Kajian Kelitbangan Yang diintegrasikan ke dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75%
7	Tersedianya hasil kajian kelitbangan yang sesuai dengan prioritas pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kajian yang sesuai dengan prioritas pembangunan yang tersusun	100%
			Persentase hasil kajian kelitbangan yang didesiminasi	100%
8	Meningkatnya pengembangan Inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Inovasi yang didiseminasi	10
			Jumlah Inovasi yang diciptakan/dikembangkan/dan ditindaklanjuti	11
			Persentase Inovasi yang terfasilitasi HAKI	5

No.	Sasaran Strategis Program	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
9	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	76
			Persentase Kepuasan ASN Bappeda dan Litbang Terhadap Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	85

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

Program

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Penelitian dan Pengembangan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran

- Rp. 6.866.082.152,-
- Rp. 1.647.020.855,-
- Rp. 1.215.163.100,-
- Rp. 8.219.349.767,-

Pada Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung tidak melakukan perubahan Perjanjian Kinerja dikarenakan tidak terdapat perubahan sasaran maupun target kinerja meski telah disusun Rencana Strategis (RENSTRA) masa transisi tahun 2025-2029.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Renstra transisi 2025-2029 dan PK Periode Terkait

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026n maupun dalam dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 . Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik, Tepat Waktu dan Inovatif	Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi	93%	74,25	79,83	T	Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Tahun 2025
		Indeks Inovasi Daerah	49,96	55	110%	ST	LHE Indeks Inovasi Daerah dari MENDAGRI
2	Meningkatnya Pembangunan yang Berkesinambungan	Persentase Tingkat Keselarasan Program	100%	100%	100%	ST	SIPD

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Prioritas RPJMD terhadap Program Prioritas RPJMN					
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi	100%	100%	100%	ST	SIPD
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RKP	100%	100%	100%	ST	SIPD
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD Dengan Program Prioritas RKPD Provinsi	100%	100%	100%	ST	SIPD

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Terkendalnya Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Dengan Kategori Sangat Tinggi	82%	77,77%	94,85%	ST	Laporan Monev RKPD
4	Meningkatnya Implementasi hasil kajian kelitbangan dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Hasil kajian kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan	70%	70%	100%	ST	Laporan MONEV KELITBANGAN Kriteria Implementasi Hasil kajian dinyatakan diimplementasikan apabila telah: digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan atau regulasi daerah, dan/atau

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja), dan/atau diterapkan dalam program, kegiatan, atau proyek pembangunan daerah.
5	Meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Inovasi Yang diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah	75%	96,55%	128,73%	ST	Laporan Monev Inovasi

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi RENJA Bappeda dan Litbang TA 2025

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa :

1. Kinerja untuk tujuan “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik, Tepat Waktu dan Inovatif” yang diukur dengan indikator Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi dan Indikator Indeks Inovasi Daerah :
 - a. **Persentase Capaian Indikator RPJMD (Kategori Sangat Tinggi) :** Realisasi mencapai **74,25%** dari target 93% (Capaian **79,83%**). Capaian ini masuk dalam kategori **T (Tinggi)** namun belum memenuhi target maksimal, yang mengindikasikan perlunya penguatan strategi dalam pengawalan target-target makro daerah.
 - b. **Indeks Inovasi Daerah :** Menunjukkan performa luar biasa dengan realisasi skor **55** dari target 49,96 (Capaian **110%**). Hal ini membuktikan efektivitas Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung dalam mendorong ekosistem inovasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung.
2. Kinerja untuk sasaran “Meningkatnya Pembangunan yang Berkesinambungan” yang diukur dengan indikator tingkat keselarasan program prioritas daerah dengan program prioritas nasional maupun provinsi yang tertuang dalam dokumen RPJMD/RKPD terhadap dokumen RPJMN/RKP serta terhadap dokumen RPJMD/RKPD Provinsi Kalimantan Utara berhasil mencapai kinerja 100% dengan persentase capaian kinerja jika dibandingkan dengan target kinerja yakni mencapai 100% dengan kategori **SANGAT TINGGI**. Keberhasilan 100% ini menunjukkan fungsi koordinasi dan integrasi perencanaan antara level daerah, provinsi, dan pusat telah berjalan sangat sinkron melalui sistem SIPD.

3. Kinerja untuk sasaran “Terkendalnya Pelaksanaan Pembangunan” diukur dengan indikator kinerja “Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Dengan Kategori Sangat Tinggi” mencapai realisasi **77,77%** dari target 82% (Capaian **94,85%**). Meskipun realisasi angka belum menyentuh angka target 82%, namun secara persentase kinerja tetap dikategorikan **Sangat Tinggi (ST)**, menunjukkan pengendalian pembangunan yang cukup terkendali.
4. Kinerja untuk sasaran “Meningkatnya Implementasi hasil kajian kelitbangan dalam pelaksanaan pembangunan” yang diukur dengan indikator kinerja “Persentase Hasil kajian kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan” tercapai target **100%** di mana 70% dengan kategori kinerja **SANGAT TINGGI (ST)** dari hasil kajian kelitbangan telah diimplementasikan dalam pembangunan. Implementasi ini dinyatakan sah karena hasil kajian telah memenuhi kriteria berikut : Menjadi dasar penyusunan regulasi/kebijakan daerah. Terintegrasi dalam dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD/Renstra/Renja). Diterapkan langsung dalam program atau proyek pembangunan
5. Kinerja untuk sasaran “Meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan” yang diukur dengan indikator “Persentase Inovasi Yang diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah” Indikator ini mencatatkan capaian tertinggi yaitu **128,73%**, dengan realisasi sebesar **96,55%** dari target 75%. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa inovasi bukan sekadar diciptakan, melainkan benar-benar diterapkan secara masif dalam operasional pembangunan daerah.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023/2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik, Tepat Waktu dan Inovatif.	Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi	85 %	80%	94,11%	n/a	n/a	n/a	93%	74,25	79,83
		Indeks Inovasi Daerah	61	46	75,4%	62	45,64	73,6%	49,96	55	110%
2	Meningkatnya Pembangunan yang Berkesinambungan	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD terhadap Program Prioritas RPJMN	n/a	n/a	n/a	90%	100%	111%	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi	n/a	n/a	n/a	90%	100%	111%	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RKP	n/a	n/a	n/a	90%	100%	111%	100%	100%	100%

		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD Dengan Program Prioritas RKPD Provinsi	n/a	n/a	n/a	90%	100%	111%	100%	100%	100%
3	Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Dengan Kategori Sangat Tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	77,77%	94,85
4	Meningkatnya Implementasi hasil kajian kelitbangan dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Hasil kajian kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan	70%	20%	28,5%	80%	70%	87,5%	70%	100%	142%
5	Meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Inovasi Yang diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah	n/a	n/a	n/a	90%	69,27%	77%	75%	96,55%	128,73%

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung, secara umum capaian kinerja menunjukkan **perkembangan yang positif** meskipun pada beberapa indikator masih terdapat fluktuasi capaian. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, implementasi inovasi daerah, serta pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Pada **Tujuan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu dan inovatif**, indikator **Persentase capaian indikator RPJMD** dalam kategori **SANGAT TINGGI (ST)** pada tahun **2023** menunjukkan realisasi sebesar **80% dari target 85%** dengan tingkat capaian **94,11%**. Sedangkan pada tahun **2025** menunjukkan realisasi penurunan kinerja sebesar **74,25%** dari target **93%** hal ini dikarenakan penetapan target yang jauh lebih ambisius pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2023, selain itu adanya masa transisi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dimana banyak indikator makro yang berubah dari dokumen perencanaan jangka menengah tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator RPJMD telah mencapai kategori sangat tinggi, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Sementara itu, pada indikator **Indeks Inovasi Daerah** terlihat adanya **fluktuasi capaian kinerja**. Pada tahun **2023** capaian sebesar **75,4%**, kemudian mengalami **penurunan pada tahun 2024 menjadi 73,6%**. Penurunan ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah inovasi yang dihasilkan maupun diimplementasikan oleh perangkat daerah

serta belum maksimalnya penguatan peran tim inovasi daerah dalam melakukan pembinaan penciptaan inovasi daerah serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi dan pemanfaatan inovasi daerah. Namun demikian, pada tahun **2025** terjadi **peningkatan yang cukup signifikan**, dimana realisasi mencapai **55 dari target 49,96** atau **110%**, sehingga indikator ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam penguatan ekosistem inovasi daerah, peningkatan komitmen perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi, serta dukungan kebijakan yang semakin mendorong penerapan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pada sasaran kinerja **meningkatnya pembangunan yang berkesinambungan**, indikator yang digunakan untuk **mengukur keselarasan program prioritas antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan nasional maupun provinsi menunjukkan capaian yang sangat baik**. Pada tahun **2024** realisasi mencapai **100% dari target 90%** dengan tingkat capaian **111%**, sedangkan pada tahun **2025** realisasi tetap **100% sesuai dengan target yang ditetapkan**. Capaian ini menunjukkan bahwa proses penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi telah dilaksanakan secara optimal yang didukung melalui Rakortekrenbang dan penerapan SIPD secara optimal. Keselarasan tersebut mencerminkan bahwa perencanaan pembangunan daerah telah mengacu pada prinsip integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar dokumen perencanaan, sehingga mampu mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Pada sasaran kinerja **Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan** dengan indikator kinerja **Persentase capaian indikator tujuan dan sasaran RKPD dengan kategori SANGAT TINGGI**. Pada tahun 2023 dan 2024 belum menjadi indikator kinerja,

namun pada tahun **2025** capaian kinerja indikator ini menunjukkan realisasi sebesar **77,77%** dari target **82%** atau dengan persentase capaian sebesar **94,85%** atau dengan predikat kinerja **SANGAT TINGGI (ST)**. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan, pengendalian, dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara ketat terhadap program-program prioritas tahunan.

Selanjutnya pada sasaran strategis **meningkatnya implementasi hasil kajian kelitbangan dalam pelaksanaan pembangunan**, capaian kinerja menunjukkan **tren peningkatan yang sangat signifikan**. Pada tahun **2023** realisasi hanya mencapai **20% dari target 70%** atau **28,5%**, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam proses pembangunan masih relatif rendah. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh terbatasnya pemanfaatan hasil kajian sebagai dasar pengambilan kebijakan maupun belum optimalnya mekanisme diseminasi hasil penelitian kepada perangkat daerah terkait. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi **peningkatan yang cukup signifikan**, dimana realisasi mencapai **70% dari target 80%** dengan tingkat capaian **87,5%**. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2025 dengan realisasi mencapai **100% dari target 70%** atau **142%**, sehingga indikator tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada sasaran strategis **meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan**, indikator **Persentase inovasi yang diimplementasikan dalam pembangunan daerah** juga menunjukkan adanya **peningkatan kinerja yang cukup signifikan**. Pada tahun 2024 realisasi mencapai **69,27% dari target 90%** dengan tingkat capaian **77%**, yang berarti belum memenuhi target yang ditetapkan. Namun pada tahun **2025** terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dimana realisasi mencapai **96,55% dari target**

75% atau **128,73%**, sehingga indikator tersebut berhasil melampaui target. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong implementasi inovasi semakin efektif, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas perangkat daerah, maupun dukungan terhadap pengembangan inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa **kinerja Badan Peren mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama pada tahun 2025**, dimana beberapa indikator kinerja utama berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa berbagai upaya perbaikan dalam perencanaan pembangunan, penguatan inovasi daerah, serta peningkatan pemanfaatan hasil kajian kelitbangan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan terutama dalam memperkuat kualitas perencanaan, memperluas implementasi inovasi daerah, serta memastikan bahwa seluruh hasil kajian kelitbangan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembangunan daerah.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) $=4/5 \times 100$
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik, Tepat Waktu dan Inovatif.	Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi	74,25	91	81,59
		Indeks Inovasi Daerah	55	50	110
2	Meningkatnya Pembangunan yang Berkesinambungan	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD terhadap Program Prioritas RPJMN	100	100	100
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi	100	100	100
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RKP	100	100	100
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD Dengan Program Prioritas RKPD Provinsi	100	100	100
3	Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Dengan Kategori Sangat Tinggi	77,77	95	81,86
4	Meningkatnya Implementasi hasil	Persentase Hasil kajian kelitbangan	70	100	70

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) $=4/5 \times 100$
	kajian kelitbangan dalam pelaksanaan pembangunan	yang diimplementasikan dalam pembangunan			
5	Meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Inovasi Yang diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah	75	96,55	77,67

Sumber : Laporan Monev RENJA Bappeda dan Litbang TA 2025

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi pada tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai target yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. Secara umum, realisasi kinerja menunjukkan tren yang sangat positif dengan rincian analisis sebagai berikut :

1. Kualitas perencanaan pembangunan daerah menunjukkan capaian yang signifikan, di mana **Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi** telah mencapai **74,25%** dari target akhir sebesar **91%** (tingkat kemajuan **81,59%**). Keberhasilan yang sangat menonjol terlihat pada **Indeks Inovasi Daerah** yang mencapai skor **55**, melampaui target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar **50** (tingkat kemajuan **110%**). Hal ini mengindikasikan bahwa ekosistem inovasi daerah telah terbentuk dan berjalan melampaui ekspektasi awal perencanaan.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung berhasil mempertahankan konsistensi perencanaan antara level daerah, provinsi, hingga nasional. Seluruh indikator keselarasan program prioritas (baik terhadap RPJMN, RKP, maupun dokumen perencanaan Provinsi) mencapai realisasi **100%**. Pencapaian ini menegaskan bahwa seluruh program yang dijalankan telah sinkron secara vertikal dan mendukung sepenuhnya agenda pembangunan nasional.
3. Dalam aspek pengendalian, **Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD dengan Kategori Sangat Tinggi** tercatat sebesar **77,77%** dari target akhir **95%**. Sementara itu, dari sisi implementasi di lapangan, terdapat beberapa poin penting:
- **Persentase Inovasi yang Diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah** telah mencapai **75%** dari target akhir **96,55%** (kemajuan **77,67%**).
 - **Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang Diimplementasikan** mencapai **70%** dari target akhir **100%**.

Data ini menunjukkan "**progres yang signifikan**" namun demikian masih diperlukannya perbaikan performa kinerja indikator Makro RPJMD Kabupaten Tana Tidung, melakukan akselerasi penerapan rekomendasi hasil kajian kelitbangan ke dalam program kerja OPD terkait, Mempertahankan ritme koordinasi demi menjaga angka keselarasan program tetap di angka 100% serta meningkatkan kualitas monitoring secara berkala agar capaian indikator RKPD dan RPJMD dalam kategori "Sangat Tinggi" dapat memenuhi target akhir yang telah ditetapkan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang

Kabupaten Tana Tidung periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik, Tepat Waktu dan Inovatif.	Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi	74,25	96	77,34
		Indeks Inovasi Daerah	55	55,23	99,58
2	Meningkatnya Pembangunan yang Berkesinambungan	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD terhadap Program Prioritas RPJMN	100	100	100
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi	100	100	100
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RKP	100	100	100
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD Dengan Program Prioritas RKPD Provinsi	100	100	100
3	Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Dengan Kategori Sangat Tinggi	77,77	96	81

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
4	Meningkatnya Implementasi hasil kajian kelitbangan dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Hasil kajian kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan	70	90	77,77
5	Meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Inovasi Yang diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah	75	85	88,23

Uraian penjelasan tabel :

Realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan fondasi yang kuat pada awal periode Renstra 2025-2029. Secara umum, sebagian besar indikator telah menunjukkan progres di atas 75% terhadap target akhir yang ditetapkan. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai capaian tersebut :

1. Persentase capaian indikator RPJMD dalam kategori "Sangat Tinggi" berada pada angka **74,25%** dari target akhir sebesar **96%** (kemajuan **77,34%**). Meskipun menunjukkan tren positif, diperlukan upaya ekstra untuk meningkatkan kualitas capaian indikator pada tahun-tahun mendatang agar memenuhi target akhir yang cukup tinggi.
2. Capaian indikator ini merupakan yang paling impresif, yakni mencapai skor **55** dari target akhir **55,23**, atau setara dengan tingkat kemajuan **99,58%**. Hal ini menunjukkan bahwa sistem inovasi daerah telah mapan dan hampir memenuhi standar target jangka panjang hanya dalam waktu satu tahun berjalan.

3. **Penyelarasan Program:** Instansi berhasil mempertahankan tingkat keselarasan sebesar **100%** terhadap Program Prioritas RPJMN, RKP, maupun Program Prioritas Provinsi. Keberhasilan mencapai target **100%** ini mencerminkan sinkronisasi kebijakan yang sempurna antara perencanaan daerah dengan perencanaan nasional dan provinsi.
4. **Pengendalian RKPD:** Capaian indikator tujuan dan sasaran RKPD dengan kategori "Sangat Tinggi" telah mencapai **77,77%** dari target akhir **96%** (tingkat kemajuan **81%**). Hal ini menandakan bahwa pengendalian pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan sesuai dengan koridor yang direncanakan.
5. **Implementasi Kajian dan Inovasi :** Persentase inovasi yang diimplementasikan telah mencapai **88,23%** dari target akhir. Sementara itu, implementasi hasil kajian kelitbangan tercatat pada angka **70%** dari target akhir **90%** (kemajuan **77,77%**).

Meskipun capaian rata-rata telah melampaui angka 75%, terdapat beberapa area yang menjadi fokus penguatan untuk mencapai target akhir Renstra 2025-2029, di antaranya:

1. Akselerasi Kelitbangan: Mendorong OPD terkait untuk segera merealisasikan rekomendasi dari hasil kajian kelitbangan agar kontribusinya terhadap pembangunan dapat meningkat dari angka 70% menuju target 90%.
2. Optimalisasi Kualitas RPJMD: Melakukan peninjauan secara berkala terhadap indikator-indikator yang masih berada di bawah kategori "Sangat Tinggi" guna mengejar ketertinggalan progres yang saat ini masih berada di angka 77,34%.
3. Keberlanjutan Inovasi: Menjaga momentum Indeks Inovasi Daerah yang sudah hampir mencapai target (99,58%) agar tetap konsisten dan tidak mengalami penurunan kualitas di sisa periode rencana.

Dari hasil evaluasi awal, dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung tidak memiliki penambahan indikator kinerja, hanya saja untuk sasaran pada urusan penelitian dan inovasi dibedakan menjadi dua sasaran, hal ini guna meningkatkan fokus kinerja dalam mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang agar lebih optimal.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun ini. Sebagian besar indikator tersebut masih dalam tahap implementasi awal sehingga capaian realisasi belum sepenuhnya mencerminkan target tahunan. Progres capaian lebih menggambarkan fase penyesuaian operasional, pembentukan baseline data, dan harmonisasi metode pengukuran.

Dari hasil evaluasi awal, indikator baru dikategorikan sebagai berikut:

- **“Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Dengan Kategori Sangat Tinggi” dengan realisasi sebesar 77,77% atau dengan persentase capaian sebesar 94,85%** menunjukkan progres yang sesuai ekspektasi,

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik, Tepat Waktu dan Inovatif.	Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi	93	74,25	79,83	1. Penyesuaian Target Pasca-Pandemi: Penetapan target kinerja yang realistis dan terukur dengan mempertimbangkan masa pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 memungkinkan instansi menjaga konsistensi capaian. 2. Akselerasi Transformasi Digital: Pemanfaatan teknologi informasi yang masif telah mendorong terciptanya tata kelola kerja yang lebih kreatif, efektif, dan efisien dalam pencapaian target-target perencanaan 3. Sinergi Perencanaan Pusat-Daerah: Mekanisme Rakortekrenbang yang	1. Membangun Satu Data Perencanaan terintegrasi dengan SIPD; 2. Melakukan revaluasi ulang terhadap target indikator setiap akhir tahun; 3. Meningkatkan kapasitas penyusun perencanaan melalui pelatihan rutin; 4. Membentuk Tim Percepatan Penyesuaian Regulasi internal

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						menitikberatkan pada keselarasan program prioritas nasional memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program di tingkat daerah Faktor Kegagalan : 1. Bias Target Masa Transisi: Adanya perumusan target yang terlalu optimis pada masa transisi penyusunan RPJMD menyebabkan beberapa indikator sulit tercapai secara maksimal sesuai realitas di lapangan. 2. Dinamika Regulasi dan Perubahan Indikator: Adanya Instruksi Menteri (Inmen) terkait penyusunan perencanaan pembangunan memunculkan indikator-indikator baru yang belum	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						pernah diukur atau dilaksanakan sebelumnya. 3. Keterbatasan Basis Data (Baseline): Munculnya berbagai indikator kinerja baru yang tidak disertai dengan ketersediaan basis data (data historis) yang memadai menyulitkan proses pengukuran dan pemantauan perkembangan kinerja secara akurat. 4. Perubahan Fokus Program: Penekanan pada program prioritas nasional terkadang memerlukan penyesuaian sumber daya yang berdampak pada pemenuhan target indikator lokal yang bersifat spesifik.	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Indeks Inovasi Daerah	49,96	55	110	Faktor Keberhasilan : 1. Implementasi Strategi <i>One Agent One Innovation</i> : Kebijakan ini efektif dalam memacu setiap unit kerja untuk menghasilkan minimal satu terobosan kreatif setiap tahunnya. 2. Penguatan Koordinasi Tim Inovasi Daerah: Peningkatan soliditas tim koordinasi memastikan seluruh inisiatif inovasi selaras dengan visi pembangunan daerah. 3. Pendampingan Intensif: Pelaksanaan pendampingan pengembangan inovasi yang menysar perangkat daerah serta elemen masyarakat terbukti meningkatkan	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kuantitas dan kualitas usulan inovasi. 4. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Pelaksanaan pengawasan secara rutin memastikan setiap tahapan inovasi berjalan sesuai rencana dan segera dilakukan perbaikan jika ditemukan kendala teknis. Faktor Kegagalan : 1. Keberlanjutan Inovasi (Sustainability): Masih ditemukan inovasi yang bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan setelah masa rintisan berakhir, sehingga dampaknya belum dirasakan secara permanen oleh masyarakat.	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Keterbatasan Mindset Inovasi: Terdapat kecenderungan pola pikir yang masih membatasi makna inovasi hanya pada pengembangan berbasis Teknologi Informasi (IT-sentris). Hal ini menghambat munculnya inovasi non-teknologi (seperti inovasi kebijakan atau sosial) yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik. 3. Implementasi di Lapangan: Meskipun indeks inovasi tinggi, Persentase Inovasi yang Diimplementasikan baru mencapai 88,23% dari target akhir, yang menunjukkan adanya jeda	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						antara penciptaan ide dengan penerapan praktis secara menyeluruh	
2	Meningkatnya Pembangunan yang Berkesinambungan	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD terhadap Program Prioritas RPJMN	100	100	100	Keberhasilan : 1. Optimalisasi Integrasi Pembangunan: Implementasi Instruksi Menteri (Inmen) Nomor 2 Tahun 2025 menjadi instrumen kunci dalam memperkuat integrasi perencanaan antara pusat dan daerah secara terukur. 2. Digitalisasi Perencanaan melalui SIPD: Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara penuh telah meminimalisir deviasi perencanaan dan memastikan setiap usulan kegiatan terkunci pada koridor	1. Memperkuat Rakortekrenbang dengan mekanisme early warning; 2. Membuat klasifikasi program prioritas nasional dan prioritas daerah yang jelas; 3. Mengalokasikan dana cadangan untuk program strategis daerah; 4. Meningkatkan koordinasi lintas OPD melalui
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi	100	100	100		
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RKP	100	100	100		
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD Dengan	100	100	100		

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Program Prioritas RKPD Provinsi				program prioritas yang selaras dengan struktur nasional. 3. Keberhasilan Program "Sinan Data": Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Tana Tidung melalui inovasi "Sinan Data" telah menyediakan basis data yang akurat, sehingga proses penyesuaian indikator kinerja didasarkan pada data yang valid dan <i>real-time</i>. <u>Kegagalan :</u> 1. Pergeseran Fokus melalui Rakortekrenbang: Mekanisme Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) sering kali mengharuskan program,	Forum Sinkronisasi Bulanan. 5. Prioritisasi program, efisiensi belanja, peningkatan PAD, dan penguatan sinergi pendanaan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kegiatan, maupun sub-kegiatan yang krusial bagi target kinerja spesifik daerah mengalami pergeseran demi mengakomodasi prioritas nasional. 2. Keterbatasan Kapasitas Fiskal: Kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat berdampak langsung pada penurunan kemampuan ekonomi fiskal daerah. Hal ini membatasi ruang gerak daerah dalam membiayai program-program prioritas pembangunan yang bersifat lokal namun strategis. 3. Dinamika Regulasi dan Batas Waktu: Munculnya indikator-indikator kinerja baru yang bersifat mandatori	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						memerlukan proses pemetaan kinerja secara berulang. Kondisi ini sering kali melewati batas waktu ideal sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga menimbulkan risiko administratif dalam siklus perencanaan.	
3	Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Dengan Kategori Sangat Tinggi	82	77,77	94,85	Keberhasilan : 1. Penguatan SAKIP dalam Perencanaan: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah, merupakan hasil nyata dari penguatan Sistem	1. Kolaborasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja dengan bidang sektoral terkait monitoring dan evaluasi pembangunan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini memastikan setiap program memiliki indikator yang lebih terukur dan selaras dengan visi daerah. 2. Sinergi Investasi melalui CSR: Keberhasilan program kerja sama <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dengan perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Tana Tidung menjadi katalisator penting dalam mendukung program-program prioritas daerah. Kemitraan ini membantu pembiayaan pembangunan di luar APBD yang berdampak langsung pada pemenuhan target kinerja.	infrastruktur dan wilayah 2. Pengembangan sistem monev berbasis aplikasi dengan fitur data <i>real time</i> berdasarkan progres kinerja bulanan hal ini dapat menunjang percepatan pengambilan keputusan/ kebijakan atas keterlambatan kinerja di lapangan 3. Kolaborasi kinerja dengan Tata Kelola Pemerintahan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						3. Optimalisasi Indikator Makro: Penguatan pada indikator-indikator makro pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat memberikan fondasi yang kuat bagi stabilitas pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan program di lapangan menjadi lebih terkendali dan relevan dengan kebutuhan publik. 4. Penguatan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah: Terjalannya sinergi yang kuat antar-OPD teknis (seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan DP3AP2KB) dalam sinkronisasi program intervensi spesifik dan sensitif. Hal ini memastikan	terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam Guna pakai data kinerja secara berkesinambungan guna menghindari gap dan ketidaksinkronan data kinerja yang dibutuhkan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						penanganan <i>stunting</i> dilakukan secara holistik dari berbagai sisi pembangunan. Kegagalan : 1. Kelemahan Sistem Pelaporan Kinerja: Masih terdapat kendala dalam sistem pelaporan yang belum sepenuhnya tepat waktu dan terukur (<i>measurable</i>). Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh data <i>time series</i> yang akurat dan berkesinambungan. 2. Keterbatasan Data untuk Penanganan Cepat: Kelemahan pada sistem data tersebut menghambat proses pengambilan keputusan pada isu-isu prioritas yang membutuhkan penanganan cepat dan responsif. Tanpa ketersediaan data yang <i>real-time</i>, evaluasi berkala terhadap	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						efektivitas kebijakan menjadi kurang maksimal.	
4	Meningkatnya Implementasi hasil kajian kelitbangan dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Hasil kajian kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan	70	100	145	Keberhasilan : 1. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan: Adanya penyesuaian antara Rencana Induk (Rinduk) Kelitbangan dengan dokumen RPJMD memastikan setiap pelaksanaan kajian lebih terarah dan relevan dengan prioritas pembangunan daerah. 2. Identifikasi Peluang Strategis: Besarnya potensi dan peluang kajian yang dapat digali dalam berbagai sektor pembangunan memberikan ruang bagi inovasi kebijakan	Penguatan Monitoring Implementasi: Menyusun instrumen pengawasan yang mewajibkan setiap perangkat daerah melaporkan sejauh mana rekomendasi dari hasil kajian kelitbangan telah diterapkan dalam program kerja mereka.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						yang berbasis data dan riset (<i>evidence-based policy</i>). Kegagalan : 1. Belum Adanya Sistem Kajian Satu Pintu: Belum terbangunnya sistem manajemen kajian yang terintegrasi karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam pembiayaan kajian mengakibatkan banyak hasil penelitian tersebar di berbagai unit kerja. Hal ini menyebabkan pemanfaatan hasil kajian tidak optimal dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan secara menyeluruh. 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kurangnya kuantitas dan kapasitas tenaga peneliti	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						internal di Kabupaten Tana Tidung menjadi kendala utama dalam kemandirian riset daerah. 3. Ketergantungan Eksternal: Akibat keterbatasan SDM lokal, pelaksanaan kajian masih sangat bergantung pada kerja sama dengan perguruan tinggi di luar kabupaten. Hal ini sering kali berdampak pada jeda waktu koordinasi dan penyesuaian konteks lokal dalam rekomendasi kebijakan. 4. Sistem Pelaporan yang Belum Measurable: Lemahnya sistem pelaporan yang tepat waktu menyulitkan proses evaluasi terhadap sejauh mana rekomendasi kajian telah benar-benar diterapkan dalam	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						program kerja perangkat daerah. 5. Lemahnya Sistem Monitoring dan Evaluasi: Belum tersedianya instrumen pengawasan yang kuat untuk memantau sejauh mana efektivitas implementasi hasil kajian dalam praktik pembangunan. Hal ini menyebabkan sulitnya mengukur dampak nyata dari rekomendasi penelitian terhadap peningkatan kinerja daerah.	
5	Meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Inovasi Yang diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah	75	96,55	128,73	Keberhasilan : 1. Program One Agent One Innovation: Kebijakan ini efektif dalam mewajibkan setiap unit kerja untuk menciptakan minimal satu	1. Perluasan Jangkauan dan Promosi: Menggencarkan diseminasi inovasi melalui platform

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						terobosan kreatif, sehingga memperkaya ragam inovasi daerah. 2. Penyusunan Roadmap SIDA: Pengembangan inovasi telah memiliki panduan yang jelas melalui <i>Roadmap</i> Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD, sehingga inovasi yang dihasilkan mendukung pencapaian visi daerah. Kegagalan : 1. Inovasi Belum Berbasis Riset: Pengembangan inovasi sebagian besar masih berfokus pada penyelesaian kendala teknis di lapangan secara spontan dan belum sepenuhnya berbasis pada	digital dan media massa untuk memastikan manfaat inovasi dirasakan secara permanen oleh masyarakat luas, bukan hanya sebagai rintisan jangka pendek. 2. Diversifikasi Inovasi Non-IT: Mendorong munculnya inovasi di bidang kebijakan dan sosial guna menghilangkan pola pikir "IT-Sentris". Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						data atau rekomendasi hasil kajian kelitbangan. Hal ini menyebabkan inovasi kurang berorientasi pada pemanfaatan strategis jangka panjang dalam mencapai kinerja pembangunan. 2. Kurangnya Diseminasi Digital: Belum terdiseminasinya informasi inovasi secara digital menyebabkan pengembangan inovasi sering kali terhenti di tahap rintisan dan tidak berkelanjutan (<i>sustainable</i>). 3. Lemahnya Promosi dan Jangkauan: Dampak pengembangan inovasi belum menyentuh masyarakat secara luas karena kurangnya strategi promosi yang masif, terkecuali	penghargaan khusus pada kategori inovasi non-digital

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						pada beberapa jenis inovasi unggulan tertentu seperti Rusa Muda. 4. Kelemahan Administrasi: Lemahnya pemenuhan dokumen administrasi pendukung inovasi berakibat pada ketidakmampuan inovasi daerah untuk berkompetisi secara optimal pada ajang penghargaan inovasi di tingkat nasional maupun internasional. 5. Pola Pikir IT-Sentris: Masih terdapat kecenderungan bahwa inovasi selalu identik dengan teknologi informasi, sehingga potensi inovasi non-digital (inovasi kebijakan/sosial) belum tergali secara maksimal.	

Sumber : Laporan Monev RENJA Triwulan 4 Tahun 2025

Berdasarkan data yang disajikan, rata-rata realisasi kinerja tahun 2025 tercatat sebesar **106,48%**. Sebagai bagian dari proses evaluasi dan upaya perbaikan ke depan, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan yang telah terjadi.

Dengan melaksanakan analisis dan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, diharapkan kinerja di masa mendatang dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini memerlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efisiensi

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik, Tepat Waktu dan Inovatif	Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi (%)	93	74,25	80%	Rp 8.513.103.007	Rp 6.980.362.174	82%	-2,63%
		Indeks Inovasi Daerah	49,96	55	110%	Rp 1.215.163.100	Rp 1.046.105.269	86%	27,88%
2	Meningkatnya Pembangunan yang Berkesinambungan	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD terhadap Program Prioritas RPJMN	100	100	100%	Rp 6.813.692.690	Rp 5.592.981.865	82%	21,83%
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi							
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RKP							

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
						ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD Dengan Program Prioritas RKPD Provinsi							
3	Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Dengan Kategori Sangat Tinggi	82	77,77	95%	Rp 1.699.410.317	Rp 1.387.380.309	82%	16,17%
4	Meningkatnya Implementasi hasil kajian kelitbangan dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Hasil kajian kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan	70	100	143%	Rp 424.307.000	Rp 365.207.400	86%	65,97%
5	Meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Inovasi Yang diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah	70	96,55	138%	Rp 790.856.100	Rp 680.897.869	86%	60,20%

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi RENJA TW IV Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diidentifikasi informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis ini merupakan langkah penting untuk menilai tingkat efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi yang bervariasi di setiap indikator sasaran. Efisiensi diukur dengan membandingkan **persentase capaian kinerja** terhadap **persentase penyerapan anggaran**. Jika capaian kinerja lebih tinggi daripada penyerapan anggaran, maka kegiatan tersebut dinilai efisien. Berikut penjelasan tingkat efisiensi pada tabel di atas :

1. Kinerja Sangat Efisien (Capaian Melampaui Target)

Dua indikator menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi (di atas 60%):

- a. **Implementasi Hasil Kajian Kelitbangan (Efisiensi 65,97%):**
Merupakan indikator paling efisien. Dengan penyerapan anggaran sebesar 86%, instansi mampu merealisasikan hasil kajian hingga 143% dari target awal. Hal ini menunjukkan optimalisasi sumber daya yang sangat baik dalam pemanfaatan hasil riset untuk pembangunan.
- b. **Implementasi Inovasi Pembangunan (Efisiensi 60,20%):**
Kinerja mencapai 138% dengan serapan anggaran hanya 86%. Hal ini mengindikasikan bahwa proses replikasi atau penerapan inovasi dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah dari yang diproyeksikan.

2. Kinerja Efisien (Capaian Selaras/Di Atas Target)

- a. **Indeks Inovasi Daerah (Efisiensi 27,88%):** Realisasi mencapai 110% dari target, sementara anggaran hanya terpakai 86%.

- b. **Keselarasan Program RPJMD-RPJMN (Efisiensi 21,83%):** Tercapai 100% (target terpenuhi sepenuhnya) dengan efisiensi sisa anggaran sebesar 18% dari pagu yang tersedia.
- c. **Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan (Efisiensi 16,17%):** Capaian indikator RKPD sebesar 95% menunjukkan kendali yang kuat meski anggaran tidak terserap sepenuhnya (82%).

3. Kinerja Kurang Efisien (Capaian di Bawah Target)

Persentase Capaian Indikator RPJMD (Efisiensi -2,63%): Ini adalah satu-satunya indikator yang menunjukkan nilai efisiensi negatif. Capaian kinerja hanya mencapai **80%** dari target, namun penyerapan anggaran sudah menyentuh **82%**. Capaian kinerja ini diukur dengan keberhasilan capaian indikator makro pada RPJMD Tahun 2021-2026 serta RPJMD Tahun 2025-2029, dimana terdapat perbedaan indikator serta target kinerja yang cukup signifikansi. Perbedaan target indikator makro tersebut dikarenakan pada masa penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 ditetapkan target yang optimis pasca Covid-19 sehingga pada capaiannya terjadi lonjakan yang besar, namun dalam penetapan target tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2025-2029 target kinerja ditetapkan dengan memperhatikan capaian kinerja dan kemampuan fiskal daerah sehingga targetnya cukup optimis sehingga capaiannya tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi. Selain itu perbedaan jumlah indikator kinerja makro RPJMD yang ditetapkan serta jenis indikator yang berbeda juga menjadi pemicu rendahnya capaian kinerja pada tahun 2025 yang juga merupakan masa transisi ini. Sehingga dari hasil capaian kinerja masing-masing Indikator makro baik pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029 diperoleh nilai rata-rata 74,25% jauh dibawah target yang telah ditetapkan yakni sebesar 82%.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	CAPAIAN	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik, Tepat Waktu dan Inovatif	Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi	79,83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	107%	Menunjang	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal Tanpa dukungan administrasi, keuangan, dan aset yang baik, program teknis akan terhambat. Tingginya capaian ini menunjukkan bahwa manajemen internal Bappeda sangat sehat dalam mendukung kegiatan substansif 2. indikator nilai saki sebagai pengukur capaian akuntabilitas kinerja Bappeda dan Litbang menunjukkan kontribusi pada capaian indikator makro RPJMD yang mengampuh sasaran Tata Kelola Pemerintahan.
		Indeks Inovasi Daerah	110		Persentase Kepuasan ASN Bappeda dan Litbang Terhadap Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	93%		
2	Meningkatnya Pembangunan yang Berkesinambungan	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD terhadap Program Prioritas RPJMN	100	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pagu Indikatif yang mendukung pembiayaan program prioritas pembangunan daerah	91%	Menunjang	1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah memberikan kontribusi besar karena adanya keselarasan

		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi	100		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RPJMD sesuai tema pembangunan tahunan	100%		dokumen perencanaan. Hal ini menunjang kinerja karena menunjukkan tidak adanya deviasi antara rencana strategis jangka menengah dengan implementasi tahunan, sehingga setiap anggaran yang keluar dipastikan mendukung target kepala daerah
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RKP	100		Persentase tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir dan terintegrasi	100%		2. Indikator "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efektif dan Tepat Waktu" didukung oleh ketersediaan data yang memadai. etersediaan data yang valid meminimalkan risiko salah sasaran dalam perencanaan. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mencapai kategori Sangat Tinggi (79,63% untuk persentase capaian indikator RPJMD).
		Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD Dengan Program Prioritas RKPD Provinsi	100					
3	Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Dengan Kategori Sangat Tinggi	94,85	PROGRAM KOORDINASI,SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian RKPD dengan kategori sangat tinggi	83%	Menunjang	
					Persentase Capaian Indikator kinerja utama Perangkat Daerah Bidang Urusan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan kategori SANGAT TINGGI	81%		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan efektivitas dalam mengawal perangkat daerah lainnya. Capaian indikator kinerja perangkat daerah di

					Persentase Capaian Indikator kinerja utama Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat kategori SANGAT TINGGI	97%		bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, serta Pemerintahan dan Kesra berada pada kategori Sangat Tinggi (berkisar antara 81% hingga 97%). Hal ini menunjukkan Bappeda berhasil menjalankan fungsinya sebagai pengarah perencanaan pembangunan, di mana pencapaian target dinas-dinas teknis selaras dengan koridor perencanaan yang disusun oleh Bappeda.
					Persentase Keselarasan RENSTRA PD bidang urusan pemerintahan, SDM dan Kesejahteraan Rakyat terhadap RPJMD	100%		
					Persentase Keselarasan RENSTRA PD bidang urusan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan terhadap RPJMD	100%		
					Persentase keselarasan RENJA PD Bidang urusan perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan terhadap RKPD	100%		
					Persentase potensi anggaran non APBD KTT yang mendukung tercapainya program prioritas pembangunan yang diperoleh	117%		
					Persentase keselarasan RENJA PD Bidang urusan pemerintahan, pembangunan manusia dan Kesejahteraan rakyat terhadap RKPD	100%		

4	Meningkatnya Implementasi hasil kajian kelitbangan dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Hasil kajian kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan	100	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI	Persentase Kajian Kelitbangan Yang diintegrasikan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah	100%	Menunjang	1. Sektor Litbang (Penelitian dan Pengembangan) menunjukkan hasil yang sangat positif dalam mendukung inovasi daerah. Kebijakan daerah tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi berbasis hasil kajian (kajian kelitbangan). Ini memperkuat legitimasi program pembangunan dan meningkatkan efektivitas implementasi inovasi di lapangan. 2. Meski inovasi daerah belum mampu memfasilitasi inovasi yang ada tersertifikasi HAKI, namun dapat terlihat bahwa inovasi yang diciptakan/dikembangkan dan ditindaklanjuti mampu diimplementasikan dalam pembangunan daerah secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
5	Meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Inovasi Yang diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah	128,73		Persentase Kajian Kelitbangan Yang diintegrasikan ke dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%		
					Persentase hasil kajian yang esuai dengan prioritas pembangunan yang tersusun	100%		
					Persentase hasil kajian kelitbangan yang didesiminasi	100%		
					Persentase Inovasi yang didiseminasi	100%		
					Jumlah Inovasi yang diciptakan/dikembangkan/dan ditindaklanjuti	100%		
					Persentase Inovasi yang terfasilitasi HAKI	0%		

Sumber : Laporan Monev RENJA TW IV TA 2025

Uraian penjelasan tabel:

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Berikut ini disajikan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota** memiliki realisasi kinerja dengan indikator Nilai AKIP sebesar **107%**, yang termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi (ST)**. Sementara itu, realisasi kinerja untuk indikator Persentase Kepuasan ASN Bappeda dan Litbang Terhadap Pelaksanaan Administrasi Perkantoran sebesar 93% yang juga termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi (ST)**. Pencapaian tersebut **Menunjang** ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal tanpa dukungan administrasi, keuangan, dan aset yang baik, program teknis akan terhambat. Tingginya capaian ini menunjukkan bahwa manajemen internal Bappeda sangat sehat dalam mendukung kegiatan substansif. Indikator nilai saki sebagai pengukur capaian akuntabilitas kinerja Bappeda dan Litbang menunjukkan kontribusi pada capaian indikator makro RPJMD yang mengampuh sasaran Tata Kelola Pemerintahan.** Keberhasilan ini juga ditunjukkan melalui penghargaan PPID atau penyelenggaraan keterbukaan informasi dan dokumentasi publik.
2. Program **Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan** memiliki realisasi kinerja dengan indikator Persentase Pagu Indikatif yang mendukung pembiayaan program prioritas pembangunan daerah sebesar **91%** yang termasuk dalam kategori kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Kemudian untuk capaian indikator kinerja **tingkat keselarasan perencanaan daerah kabupaten dengan perencanaan pusat dan daerah provinsi** memiliki realisasi kinerja sebesar **100%** yang termasuk dalam kategori kinerja **Sangat Tinggi**. Selanjutnya,

untuk capaian indikator kinerja **tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir dan terintegrasi** memiliki realisasi kinerja sebesar **100%** yang termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Terakhir untuk indikator kinerja **capaian RKPD dengan kategori sangat tinggi** memiliki realisasi kinerja sebesar **83%** yang termasuk dalam kategori **Tinggi**. Pencapaian kinerja tersebut **Menunjang** ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena dengan adanya keselarasan dokumen perencanaan, hal ini menunjukkan tidak adanya deviasi antara rencana strategis jangka menengah dengan implementasi tahunan, sehingga setiap anggaran yang keluar dipastikan mendukung target kepala daerah. Indikator "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efektif dan Tepat Waktu" didukung oleh ketersediaan data yang memadai. Ketersediaan data yang valid meminimalkan risiko salah sasaran dalam perencanaan. Hal ini tercermin dari capaian RKPD yang mencapai kategori **Tinggi** yakni sebesar **83%**.

3. Program **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** memiliki realisasi kinerja dengan indikator **Capaian Indikator kinerja utama Perangkat Daerah Bidang Urusan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan kategori SANGAT TINGGI** sebesar **81%** yang termasuk dalam kategori **Tinggi**. Realisasi kinerja dengan indikator **Capaian Indikator kinerja utama Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat kategori SANGAT TINGGI** sebesar **97%** yang termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi Kinerja dengan indikator **Keselarasan RENSTRA PD terhadap RPJMD** sebesar **100%** yang termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Sementara itu, realisasi kinerja dengan indikator **potensi anggaran non APBD KTT yang mendukung tercapainya program prioritas pembangunan yang diperoleh** sebesar **100%** yang termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Terakhir realisasi kinerja dengan indikator

kinerja **keselarasan RENJA PD terhadap RKPD** sebesar **100%** yang termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Pencapaian tersebut **Menunjang** ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan karena menunjukkan bahwa Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan efektivitas dalam mengawal perangkat daerah lainnya. Capaian indikator kinerja perangkat daerah di bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, serta Pemerintahan dan Kesra berada pada kategori Sangat Tinggi (berkisar antara 81% hingga 97%). Hal ini menunjukkan Bappeda berhasil menjalankan fungsinya sebagai pengarah perencanaan pembangunan, di mana pencapaian target dinas-dinas teknis selaras dengan koridor perencanaan yang disusun oleh Bappeda. Selain itu, keberhasilan Bappeda dan Litbang dalam mengupayakan sumber pendapatan lain diluar APBD seperti program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) mampu membantu program-program prioritas pembangunan daerah.

4. Program **Penelitian dan Pengembangan Daerah** memiliki realisasi kinerja dengan indikator Kajian Kelitbang Yang diintegrasikan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan perencanaan Perangkat Daerah sebesar **100%** yang termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi kinerja indikator hasil kajian yang sesuai dengan prioritas pembangunan yang tersusun, Inovasi yang didiseminasi, dan Jumlah Inovasi yang diciptakan/dikembangkan/dan ditindaklanjuti memiliki tingkat capaian sebesar **100%** yang termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Sementara itu, untuk realisasi kinerja indikator Inovasi yang terfasilitasi HAKI memiliki capaian sebesar **0%** yang termasuk dalam kategori **Sangat Rendah**. Pencapaian tersebut **Menunjang** ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena sektor Litbang (Penelitian dan Pengembangan) menunjukkan hasil yang sangat positif dalam mendukung inovasi daerah. Kebijakan daerah tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi berbasis hasil kajian (kajian kelitbang). Ini memperkuat legitimasi program

pembangunan dan meningkatkan efektivitas implementasi inovasi di lapangan. Meski inovasi daerah belum mampu memfasilitasi inovasi yang ada agar tersertifikasi HAKI, namun dapat terlihat bahwa inovasi yang diciptakan/dikembangkan dan ditindaklanjuti mampu diimplementasikan dalam pembangunan daerah secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta Indeks Inovasi Daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp 8.219.349.767,00	Rp 7.818.562.072,00	95,12
2	Perencanaan, Penggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 139.374.996,00	Rp 133.745.744,00	95,96
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.627.514.260,00	Rp 6.391.550.289,00	96,44
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 6.856.000,00	Rp 5.773.030,00	84,20
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 812.052.011,00	Rp 697.858.026,00	85,94
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 323.003.500,00	Rp 280.144.383,00	86,73

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
7	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 310.549.000,00	Rp 309.490.600,00	99,66
8	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 6.866.082.152,00	Rp 5.585.994.544,00	81,36
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 5.671.463.990,00	Rp 4.643.996.209,00	81,88
10	Analisis Data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 261.716.200,00	Rp 248.694.335,00	95,02
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 932.901.962,00	Rp 693.304.000,00	74,32
12	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.647.020.855,00	Rp 1.394.367.630,00	84,66
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 657.207.055,00	Rp 544.969.783,00	82,92
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 477.244.000,00	Rp 365.638.968,00	76,61
15	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Kewilayahan	Rp 512.569.800,00	Rp 483.758.879,00	94,38
16	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.215.163.100,00	Rp 1.046.105.269,00	86,09
17	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp 424.307.000,00	Rp 365.207.400,00	86,07

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
18	Pengembangan inovasi dan teknologi	Rp 790.856.100,00	Rp 680.897.869,00	86,10

Sumber : SIPD Penatausahaan

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat realisasi dan serapan anggaran dari masing-masing program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah analisis terhadap data tersebut:

1. Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **95,12%**. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut **terrealisasi**. Hal ini disebabkan oleh **tingginya persentase serapan anggaran yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program**.
2. Program **Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **81,36%**. Capaian ini menunjukkan anggaran untuk program tersebut terealisasi. Dengan serapan dana yang cukup tinggi **yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program**, meski demikian terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kinerja yakni regulasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dimana terdapat banyak perbedaan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, adanya indikator mandatori yang baru diterbitkan setelah penyusunan RPJMD dan RENSTRA tahun 2025-2029 hampir rampung, dimana indikator-indikator tersebut tidak memiliki baseline data dan metode pengukuran yang jelas sehingga cukup sulit untuk dilakukan pengukuran baseline data sebagai dasar perencanaan pembangunan.

3. Program **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **84,66 %**. Capaian ini menunjukkan anggaran untuk program tersebut terealisasi cukup baik dengan kategori **Tinggi**. Dengan serapan dana yang cukup tinggi **yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program**, meski demikian terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kinerja yakni kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM pada Bidang Sektoral yang tidak sebanding dengan beban kerja, belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi atas program Tanggung Jawab Sosial Di Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sehingga program yang terlaksana belum dapat diukur kontribusinya dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah.
4. Program **Penelitian dan Pengembangan** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **86,09%**. Capaian ini menunjukkan anggaran untuk program tersebut terealisasi cukup baik dengan kategori **Tinggi**. Dengan serapan dana yang cukup tinggi **yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program**, meski demikian terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kinerja yakni belum terlaksananya sistem kajian satu pintu hal ini diakibatkan belum memadainya kapasitas dan kuantitas SDM peneliti yang berperan penting dalam pelaksanaan kajian mandiri,

belum optimalnya perencanaan anggaran dalam urusan pelaksanaan kajian sehingga untuk melaksanakan seluruh kajian perangkat daerah sesuai kebutuhan masih belum dapat dilakukan dan saat ini kajian yang dilaksanakan baru sebatas kajian yang direkomendasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang kemudian diharmonisasikan dalam Rencana Induk Kelitbangan. Belum optimalnya inventarisasi kajian yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah SDM pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, sehingga seluruh kajian Perangkat Daerah belum mampu terukur kontribusinya dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 . Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan 3 (tiga) sasaran strategis tercapai dan 1 (satu) sasaran strategis tidak tercapai.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung memiliki 9 (Sembilan) indikator kinerja utama dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama tercapai dan 2 (dua) indikator kinerja utama tidak tercapai.

3. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung yakni :
- a. **Bias Target Masa Transisi:** Adanya perumusan target yang terlalu optimis pada masa transisi penyusunan RPJMD menyebabkan beberapa indikator sulit tercapai secara maksimal sesuai realitas di lapangan.
 - b. **Dinamika Regulasi dan Perubahan Indikator:** Adanya Instruksi Menteri (Inmen) terkait penyusunan perencanaan pembangunan memunculkan indikator-indikator baru yang belum pernah diukur atau dilaksanakan sebelumnya.
 - c. **Keterbatasan Basis Data (Baseline):** Munculnya berbagai indikator kinerja baru yang tidak disertai dengan ketersediaan basis data (data historis) yang memadai menyulitkan proses pengukuran dan pemantauan perkembangan kinerja secara akurat.
 - d. **Perubahan Fokus Program:** Penekanan pada program prioritas nasional terkadang memerlukan penyesuaian sumber daya yang berdampak pada pemenuhan target indikator lokal yang bersifat spesifik.
 - e. **Keberlanjutan Inovasi (Sustainability):** Masih ditemukan inovasi yang bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan setelah masa rintisan berakhir, sehingga dampaknya belum dirasakan secara permanen oleh masyarakat.
 - f. **Keterbatasan Mindset Inovasi:** Terdapat kecenderungan pola pikir yang masih membatasi makna inovasi hanya pada pengembangan berbasis Teknologi Informasi (IT-sentris). Hal ini menghambat munculnya inovasi non-teknologi (seperti inovasi kebijakan atau sosial) yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik.

- g. **Implementasi di Lapangan:** Meskipun indeks inovasi tinggi, **Persentase Inovasi yang Diimplementasikan** baru mencapai **96,55%**. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA Bappeda dan Litbang Tahun 2021-2026 capaian kinerja baru sebesar **88,23 %**, yang menunjukkan adanya jeda antara penciptaan ide dengan penerapan praktis secara menyeluruh.
- h. **Pergeseran Fokus melalui Rakortekrenbang:** Mekanisme Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) sering kali mengharuskan program, kegiatan, maupun sub-kegiatan yang krusial bagi target kinerja spesifik daerah mengalami pergeseran demi mengakomodasi prioritas nasional.
- i. **Keterbatasan Kapasitas Fiskal:** Kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat berdampak langsung pada penurunan kemampuan ekonomi fiskal daerah. Hal ini membatasi ruang gerak daerah dalam membiayai program-program prioritas pembangunan yang bersifat lokal namun strategis.
- j. **Dinamika Regulasi dan Batas Waktu:** Munculnya indikator-indikator kinerja baru yang bersifat mandatori memerlukan proses pemetaan kinerja secara berulang. Kondisi ini sering kali melewati batas waktu ideal sesuai ketentuan **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga menimbulkan risiko administratif dalam siklus perencanaan.
- k. **Kelemahan Sistem Pelaporan Kinerja:** Masih terdapat kendala dalam sistem pelaporan yang belum sepenuhnya tepat waktu dan terukur (*measurable*). Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh data *time series* yang akurat dan berkesinambungan.
- l. **Keterbatasan Data untuk Penanganan Cepat:** Kelemahan pada sistem data tersebut menghambat proses pengambilan keputusan pada isu-isu prioritas yang membutuhkan penanganan cepat dan responsif. Tanpa ketersediaan data yang *real-time*, evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan menjadi kurang maksimal.

- m. **Belum terselenggaranya Sistem Kajian Satu Pintu:** Belum terbangunnya sistem manajemen kajian yang terintegrasi karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam pembiayaan kajian mengakibatkan banyak hasil penelitian tersebar di berbagai unit kerja. Hal ini menyebabkan pemanfaatan hasil kajian tidak optimal dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan secara menyeluruh.
- n. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:** Kurangnya kuantitas dan kapasitas tenaga peneliti internal di Kabupaten Tana Tidung menjadi kendala utama dalam kemandirian riset daerah.
- o. **Ketergantungan Eksternal:** Akibat keterbatasan SDM lokal, pelaksanaan kajian masih sangat bergantung pada kerja sama dengan perguruan tinggi di luar kabupaten. Hal ini sering kali berdampak pada jeda waktu koordinasi dan penyesuaian konteks lokal dalam rekomendasi kebijakan.
- p. **Sistem Pelaporan yang Belum Measurable:** Lemahnya sistem pelaporan yang tepat waktu menyulitkan proses evaluasi terhadap sejauh mana rekomendasi kajian telah benar-benar diterapkan dalam program kerja perangkat daerah.
- q. **Lemahnya Sistem Monitoring dan Evaluasi:** Belum tersedianya instrumen pengawasan yang kuat untuk memantau sejauh mana efektivitas implementasi hasil kajian dalam praktik pembangunan. Hal ini menyebabkan sulitnya mengukur dampak nyata dari rekomendasi penelitian terhadap peningkatan kinerja daerah.
- r. **Inovasi Belum Berbasis Riset:** Pengembangan inovasi sebagian besar masih berfokus pada penyelesaian kendala teknis di lapangan secara spontan dan belum sepenuhnya berbasis pada data atau rekomendasi hasil kajian kelitbang. Hal ini menyebabkan inovasi kurang berorientasi pada kemanfaatan strategis jangka panjang dalam mencapai kinerja pembangunan.
- s. **Kurangnya Diseminasi Digital:** Belum terdiseminasinya informasi inovasi secara digital menyebabkan pengembangan

inovasi sering kali terhenti di tahap rintisan dan tidak berkelanjutan (*sustainable*).

- t. **Lemahnya Promosi dan Jangkauan:** Dampak pengembangan inovasi belum menyentuh masyarakat secara luas karena kurangnya strategi promosi yang masif, terkecuali pada beberapa jenis inovasi unggulan tertentu seperti **Rusa Muda**.
- u. **Kelemahan Administrasi:** Lemahnya pemenuhan dokumen administrasi pendukung inovasi berakibat pada ketidakmampuan inovasi daerah untuk berkompetisi secara optimal pada ajang penghargaan inovasi di tingkat nasional maupun internasional.
- v. **Pola Pikir IT-Sentris:** Masih terdapat kecenderungan bahwa inovasi selalu identik dengan teknologi informasi, sehingga potensi inovasi non-digital (inovasi kebijakan/sosial) belum tergali secara maksimal.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

1. Membangun Satu Data Perencanaan terintegrasi dengan SIPD;
2. Melakukan reviu ulang terhadap target indikator setiap akhir tahun;
3. Meningkatkan kapasitas penyusun perencanaan melalui pelatihan rutin;
4. Membentuk Tim Percepatan Penyesuaian Regulasi internal;
5. Memperkuat Rakortekrenbang dengan mekanisme early warning;
6. Membuat klasifikasi program prioritas nasional dan prioritas daerah yang jelas;
7. Mengalokasikan dana cadangan untuk program strategis daerah;
8. Meningkatkan koordinasi lintas OPD melalui Forum Sinkronisasi Bulanan;
9. Prioritisasi program, efisiensi belanja, peningkatan PAD, dan penguatan sinergi pendanaan;

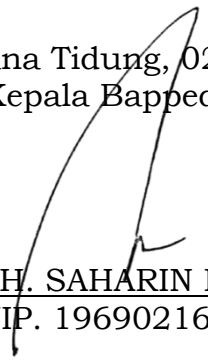
10. Kolaborasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja dengan bidang sektoral terkait monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur dan wilayah;
11. Pengembangan sistem monev berbasis aplikasi dengan fitur data *real time* berdasarkan progres kinerja bulanan hal ini dapat menunjang percepatan pengambilan keputusan/ kebijakan atas keterlambatan kinerja di lapangan;
12. Kolaborasi kinerja dengan Tata Kelola Pemerintahan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam Guna pakai data kinerja secara berkesinambungan guna menghindari gap dan ketidaksinkronan data kinerja yang dibutuhkan;
13. **Penguatan Monitoring Implementasi:** Menyusun instrumen pengawasan yang mewajibkan setiap perangkat daerah melaporkan sejauh mana rekomendasi dari hasil kajian kelitbang telah diterapkan dalam program kerja mereka.
14. **Perluasan Jangkauan dan Promosi:** Menggencarkan diseminasi inovasi melalui platform digital dan media massa untuk memastikan manfaat inovasi dirasakan secara permanen oleh masyarakat luas, bukan hanya sebagai rintisan jangka pendek.
15. **Diversifikasi Inovasi Non-IT:** Mendorong munculnya inovasi di bidang kebijakan dan sosial guna menghilangkan pola pikir "IT-Sentris". Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan penghargaan khusus pada kategori inovasi non-digital

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 merupakan periode **konsolidasi dan transformasi paradigma akuntabilitas**. Meskipun terdapat perbedaan tren antara angka capaian makro (RPJMD) dan operasional (RKPD), hal tersebut bukan merepresentasikan penurunan kualitas kerja, melainkan dampak positif dari **peningkatan standar pengukuran kinerja**.

Peralihan fokus dari pengukuran tata kelola administratif (berbasis nilai SAKIP) pada tahun sebelumnya, menjadi pengukuran capaian indikator riil (berbasis *outcome*) pada tahun 2025, telah meletakkan *baseline* data yang lebih objektif dan kredibel. Dengan keberhasilan mencapai target RKPD sebesar 94,85%, organisasi telah memiliki fondasi manajerial yang kuat untuk mengakselerasi pemenuhan target jangka menengah RPJMD di tahun-tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stake holder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tana Tidung.

Tana Tidung, 02 Februari 2025
Kepala Bappeda dan Litbang



H. SAHARIN K., S.Pi., M.Si
NIP. 19690216 199803 1 006

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG
APBD MURNI TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. Saharin K, S.Pi., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

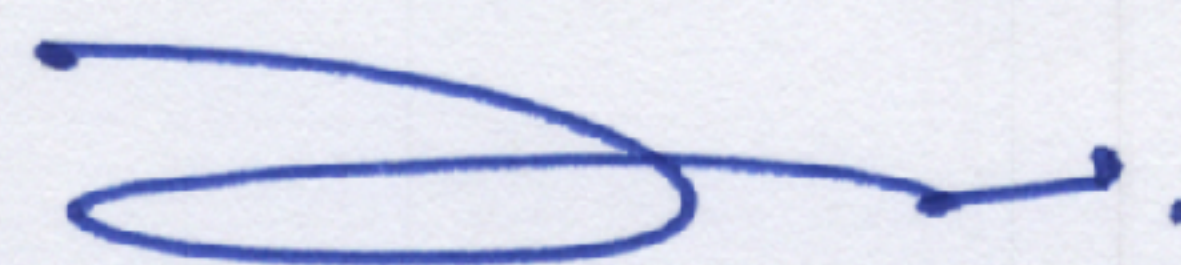
Nama : **IBRAHIM ALI, S.P**
Jabatan : **BUPATI TANA TIDUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

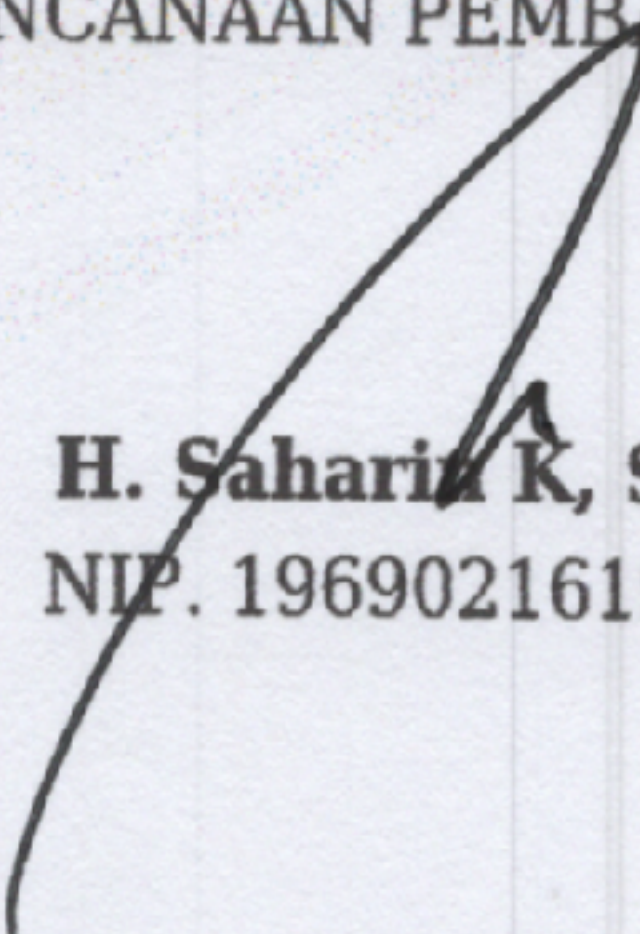
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI TANA TIDUNG


IBRAHIM ALI, S.P

Tana Tidung, 2 Januari 2025
Pihak Pertama

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG


H. Saharin K, S.Pi., M.Si
NIP. 196902161998031006

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG
APBD MURNI TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya sinergitas Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional		
	1	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD terhadap Program Prioritas RPJMN	% 93
	2	Persentase Tingkat KeselarasanProgram Prioritas RPJMD dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi	% 93
	3	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RKP	% 93
	4	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD Dengan Program Prioritas RKPD Provinsi	% 93
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah		
	1	Persentase Hasil kajian kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan	% 88
3	Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan		
	1	Persentase Capaian Program Prioritas Pembangunan Dalam Kategori Sangat Baik	% 92

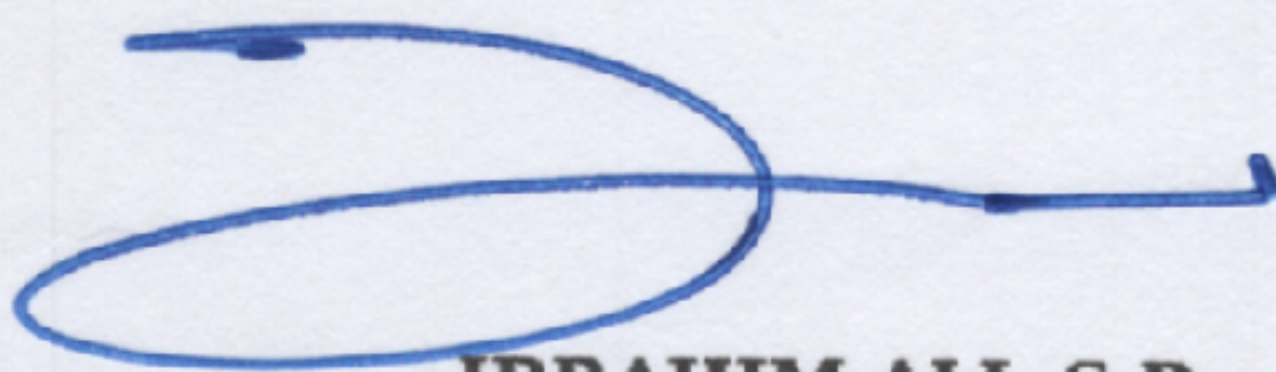
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
5.01.02. Program PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. Rp 7.400.805.500,00
5.01.02.2.01. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. Rp 6.080.373.500,00
5.01.02.2.01.01. SubKegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp. Rp 275.801.000,00
5.01.02.2.01.03. SubKegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp. Rp 248.614.400,00
5.01.02.2.01.04. SubKegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp. Rp 109.595.100,00
5.01.02.2.01.05. SubKegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp. Rp 536.514.000,00
5.01.02.2.01.07. SubKegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. Rp 4.909.849.000,00
5.01.02.2.02. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. Rp 0,00
5.01.02.2.02.01. SubKegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. Rp 0,00
5.01.02.2.03. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. Rp 1.029.243.000,00
5.01.02.2.03.03. SubKegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. Rp 1.029.243.000,00
5.01.03. Program PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. Rp 2.540.790.255,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

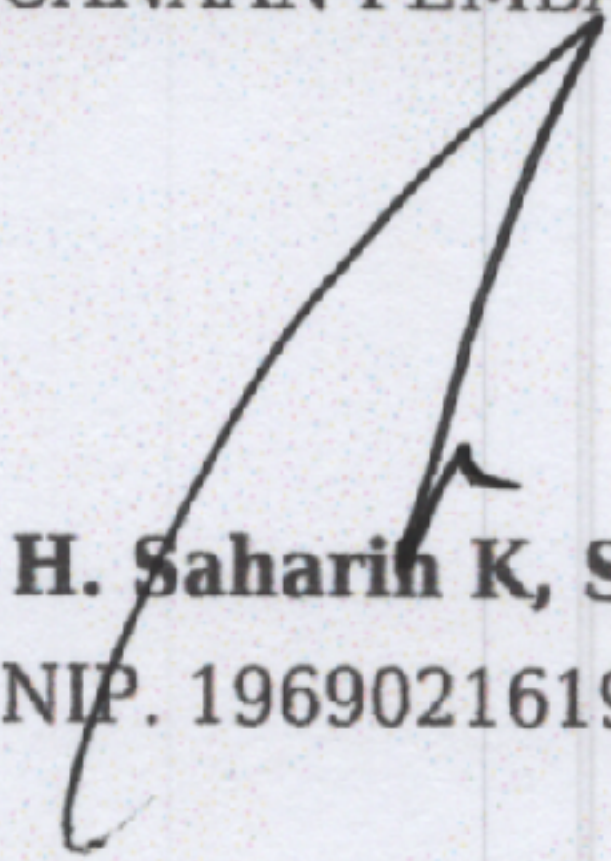
ANGGARAN

5.01.03.2.01. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp. Rp 873.954.255,00
5.01.03.2.01.05. SubKegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. Rp 596.183.700,00
5.01.03.2.01.0003. SubKegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. Rp 277.770.555,00
5.01.03.2.02. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp. Rp 725.552.500,00
5.01.03.2.02.01. SubKegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. Rp 725.552.500,00
5.01.03.2.03. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. Rp 941.283.500,00
5.01.03.2.03.0008. SubKegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. Rp 941.283.500,00
5.05.02. Program PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. Rp 1.284.345.000,00
5.05.02.2.01. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. Rp 0,00
5.05.02.2.04. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. Rp 836.473.000,00
5.05.02.2.04.01. SubKegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp. Rp 836.473.000,00
5.05.02.2.03. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp. Rp 238.936.000,00
5.05.02.2.03.0007. SubKegiatan penelitian dan Lingkungan Hidup	Rp. Rp 238.936.000,00
5.01.02. Program PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. Rp 7.400.805.500,00

Pihak Kedua
BUPATI TANA TIDUNG


IBRAHIM ALI, S.P

Tana Tidung, 2 Januari 2025
Pihak Pertama
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG


H. Saharini K, S.Pi., M.Si
NIP. 196902161998031006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. SAHARIN K, S.PI., M.SI

Jabatan : Kepala Badan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : IBRAHIM ALI

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANA TIDUNG, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA

IBRAHIM ALI, S.P

PIHAK PERTAMA

H. SAHARIN K, S.PI., M.Si
NIP. 196902161998031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
TANA TIDUNG

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
	TUJUAN		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Yang Baik Tepat Waktu dan Inovatif	Persentase capaian indikator RPJMD dalam Kategori sangat tinggi	93 %
		Indeks Inovasi Daerah	49,96 Indeks
	SASARAN		
2	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Persentase Keselarasan RPJMD terhadap RPJMN	100 %
		Persentase keselarasan RPJMD terhadap RPJMD Provinsi	100 %
		Persentase Keselarasan RKPD Terhadap RKP	100 %
		Persentase Keselarasan RKPD Terhadap RKPD Provinsi	100 %
3	Terkendalinya pelaksanaan pembangunan	Rata-rata Capaian Indikator Sasaran RPJMD tahun rencana dalam kategori sangat baik	82 Nilai
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pembangunan daerah	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang diimplementasikan dalam pembangunan daerah	70 %
5	Meningkatnya pemanfaatan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase Inovasi Yang Diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah	70 Persen

	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.044.059.245
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	7.400.805.500
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.540.790.255
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.284.345.000

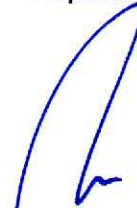
TANA TIDUNG, 02 Januari 2025

Bupati TANA TIDUNG



IBRAHIM ALI, S.P

Kepala Badan



H. SAHARIN K, S.Pi., M.Si
NIP 196902161998031006

Lampiran 3 : Matriks Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik, Tepat Waktu dan Inovatif		Persentase Capaian Indikator RPJMD dalam Kategori Sangat Tinggi (%)	90	91	92	93	94	95	96	
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	47,05	48,64	49,96	51,28	52,59	53,91	55,23	
		Meningkatnya Pembangunan yang Berkesinambungan	Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD terhadap Program Prioritas RPJMN (%)	90	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RPJMD dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi (%)	90	100	100	100	100	100	100	

Lampiran 3 : Matriks Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RKP (%)	90	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD Dengan Program Prioritas RKPD Provinsi (%)	90	100	100	100	100	100	100	
		Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Dengan Kategori Sangat Tinggi (%)	90	91	92	93	94	95	96	
		Meningkatnya Implementasi hasil kajian kelitbangan dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Hasil kajian kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan (%)	60	70	75	80	82	85	90	

Lampiran 3 : Matriks Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya implementasi inovasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Inovasi Yang diimplementasikan dalam Pembangunan Dearah (%)	70	75	76	78	80	82	85	



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

INSPEKTORAT

Alamat : Jalan Perintis KM 1, RT. VI Tideng Pale

Kode Pos: 77152

Nomor : 700.1.2.1/07.A/LHE/INSP-KTT/X/2025
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) tahun 2025

31 Oktober 2025

**Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
di Tideng Pale**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/057/K-V/2025 tentang Penetapan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut:

A. Nilai Implementasi SAKIP

Implementasi SAKIP dilakukan atas 4 komponen yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja, dengan nilai SAKIP sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/KRITERIA	BOBOT	NILAI
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	27,00
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	8,10
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,50
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,60

2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,20
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,30
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,60
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	17,50
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,50
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,75
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		100,00	81,41
PREDIKAT			A

B. Area yang masih Memerlukan Perbaikan

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat area yang masih memerlukan perbaikan antara lain sebagai berikut:

Komponen/ Subkomponen	Uraian Area yang Memerlukan Perbaikan/ AOI
Perencanaan Kinerja	1. Belum semua pegawai memahami capaian kinerja yang telah direncanakan.
Pengukuran Kinerja	1. Belum semua pegawai memahami atas hasil pengukuran kinerja
Pelaporan Kinerja	1. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan namun belum tersaji secara terinci.

Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mandiri belum tertib dilaksanakan secara berkala
------------------	--

C. Apresiasi

Tim Evaluasi Implementasi SAKIP perangkat daerah menyampaikan terima kasih atas kerjasama dari tim Implementasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam memberikan data serta informasi yang diperlukan, sehingga mendukung pelaksanaan evaluasi ini.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini dapat kami sampaikan, agar dapat segera ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



 INSPEKTUR
Dimas Aditya S. Hut, CFrA, CGCAE,
QRMA, ERMAP
 NIP. 198305082005021004

Tembusan;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung
2. Arsip

Lampiran 6 : Prestasi Bappeda dan Litbang

